

**STRATEGI PKB KABUPATEN LAHAT DALAM
MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT
MUSLIM PADA PEMILU LEGISLATIF 2019 STUDI KASUS
DAPIL 1**



SKRIPSI

**Diajukan
untuk melengkapi salah satu persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
dalam program studi politik islam**

**Oleh:
ROBBI WAHYUDI
NIM.1710404010**

**PROGRAM STUDI POLITIK ISLAM
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG
2021**

NOMOR : B.1902 /Un.09/IV.3 /PP.009/11 /2021

SKRIPSI
STRATEGI PKB KABUPATEN LAHAT DALAM MENINGKATKAN PARTISIPSI
POLITIK MASYARAKAT MUSLIM PADA PEMILU LEGISLATIF 2019 STUDI
KASUS DAPIL 1

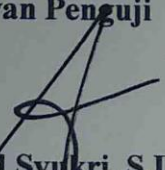
Yang telah disusun dan dipersiapkan oleh

ROBBI WAHYUDI
NIM. 1710404010


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 18 November 2021

Susunan Dewan Pembimbing dan Penguji

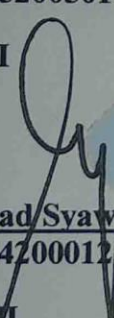
Ketua Dewan Penguji


Dr. Ahmad Syukri, S.IP., M.Si.
NIP. 197701252005011014

Sekretaris


Kiki Mikail, M.A.
NIP. 198409212019031004


Pembimbing I


Dr. Mohammad Syawaluddin, M.Ag
NIP. 197111242000121001

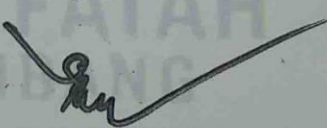
Penguji I


Dr. Ahmad Syukri, S.IP., M.Si.
NIP. 197701252005011014

Pembimbing II



Nico Octario Adytyas, M.A
NIDN.2010109102

Penguji II

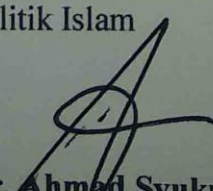

Kiki Mikail, M.A
NIP. 198409212019031004

Skripsi ini telah diterima sebagai salah
satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana (S.Sos)
Tanggal, 22 November 2021

Dekan
Fakultas Adab dan Humaniora


Dr. Endang Rochmiatun, M.Hum.
NIP. 197107271997032005

Ketua Program Studi
Politik Islam


Dr. Ahmad Syukri, S.IP., M.Si.
NIP. 197701252005011014

NOTA DINAS KOMPREHENSIF

Perihal : Skripsi Saudara
Robbi Wahyudi

Kepada Yth
Dekan Fakultas Adab dan Humaniora
UIN Raden Fatah Palembang
Di-

Tempat

Assalamu'alaikumwarrahmatullahiwabarakatuh

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah skripsi yang berjudul:

“Strategi PKB Kabupaten Lahat dalam meningkatkan pasrtisipasi politik masyarakat muslim pada Pemilu Legislatif 2019 studi kasus dapil 1 Kabupaten Lahat”

Yang ditulis oleh:

Nama : Robbi Wahyudi
NIM : 1710404010
Jurusan : Politik Islam

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan ke Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang untuk diujikan dalam rangka mengikuti Ujian Komprehensif Jurusan Politik Islam.

Wasalamu'alaikum Wr. Wb

Palembang, 15 Oktober 2021

Pembimbing I


Dr. Mohammad Syawaluddin, MA
NIP. 197111242000121001

NOTA DINAS KOMPREHENSIF

Perihal : Skripsi Saudara
Robbi Wahyudi

Kepada Yth
Dekan Fakultas Adab dan Humaniora
UIN Raden Fatah Palembang
Di-

Tempat

Assalamu'alaikumwarrahmatullahiwabarakatuh

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah skripsi yang berjudul:

“Strategi PKB Kabupaten Lahat dalam meningkatkan pasrtisipasi politik masyarakat muslim pada Pemilu Legislatif 2019 studi kasus dapil 1 Kabupaten Lahat”

Yang ditulis oleh:

Nama : Robbi Wahyudi
NIM : 1710404010
Jurusan : Politik Islam

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan ke Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang untuk diujikan dalam rangka mengikuti Ujian Komprehensif Jurusan Politik Islam.

Wasalamu'alaikum Wr. Wb

Palembang, 15 Oktober 2021

Pembimbing II



Nico Oktario Adytyas, MA
NIDN.2010109102

NOTA DINAS MUNOQOSAH

Perihal : Skripsi Saudara
Robbi Wahyudi

Kepada Yth
Dekan Fakultas Adab dan Humaniora
UIN Raden Fatah Palembang
Di-

Tempat

Assalamu'alaikumwarrahmatullahiwabarakatuh

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah skripsi yang berjudul:

“Strategi PKB Kabupaten Lahat dalam meningkatkan pasrtisipasi politik masyarakat muslim pada Pemilu Legislatif 2019 studi kasus dapil 1 Kabupaten Lahat”

Yang ditulis oleh:

Nama : Robbi Wahyudi
NIM : 1710404010
Jurusan : Politik Islam

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan ke Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar SarjanaSosial (S.Sos) Jurusan Poltik Islam.

Wasalamu'alaikum Wr.Wb

Palembang, 25 Oktober 2021

Pembimbing I


Dr. Mohammad Syawaluddin, MA
NIP. 197111242000121001

NOTA DINAS MUNOQOSAH

Perihal : Skripsi Saudara
Robbi Wahyudi

Kepada Yth
Dekan Fakultas Adab dan Humaniora
UIN Raden Fatah Palembang
Di-

Tempat

Assalamu'alaikumwarrahmatullahiwabarakatuh

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah skripsi yang berjudul:

“Strategi PKB Kabupaten Lahat dalam meningkatkan pasrtisipasi politik masyarakat muslim pada Pemilu Legislatif 2019 studi kasus dapil 1 Kabupaten Lahat”

Yang ditulis oleh:

Nama : Robbi Wahyudi
NIM : 1710404010
Jurusan : Politik Islam

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan ke Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar SarjanaSosial (S.Sos) Jurusan Poltik Islam.

Wasalamu'alaikum Wr.Wb

Palembang, 25 Oktober 2021

Pembimbing II



Nico Oktario Adytyas, MA
NIDN.2010109102

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing skripsi :

1. Dr. Mohammad Syawaluddin
NIP. 197111242000121001
2. Nico Oktario Adytyas, MA
NIDN.2010109102

Dengan ini menyetujui bahwa skripsi yang berjudul “Strategi PKB Kabupaten Lahat dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat muslim pada pemilu legislatif 2019 studi kasus dapil 1 Kabupaten Lahat” Yang di tulis oleh :

Nama : Robbi Wahyudi
NIM : 1710404010
JURUSAN : Politik Islam

Untuk diajukan dalam sidang Munoqosah

Palembang, 25 Oktober 2021

Pembimbing I



Dr. Mohammad Syawaluddin, MA
NIP. 197111242000121001

Pembimbing II



Nico Oktario Adytyas, MA
IDN.2010109102

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Robbi Wahyudi
Nim : 1710404010
Fakultas : Adab dan Humaniora
Program Studi : Politik Islam
Judul Skripsi : Strategi PKB Kabupaten Lahat dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat muslim pada pemilu legislatif 2019 studi kasus dapil 1 Kabupaten Lahat.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah di ajukan untuk memperoleh gelar keserjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulisa atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Palembang, 1 November 2021
Penulis

Robbi Wahyudi
NIM.1710404010

MOTTO

“Menjadi penting itu baik tapi menjadi baik jauh lebih penting”

-Jend Hoegeng-

SKRIPSI INI SPESIAL KUPERSEMBAHKAN KEPADA

Alm. Papa, Mama dan Adik-adiku

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil‘alamin, segala puji bagi Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan Hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat-Nya.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak sedikit bantuan yang penulis terima dari keluarga, dosen, teman-teman penulis, baik bantuan moril maupun materil. Bantuan tersebut telah meringankan beban penulis sehingga terselesaikannya skripsi yang berjudul berjudul **“Strategi PKB Kabupaten Lahat dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat muslim pada pemilu legislatif 2019 studi kasus dapil 1 Kabupaten Lahat”**.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tidak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, khususnya kepada:

1. Ayahanda tercinta Alm. Muhammad Padil, S.Ag
2. Ibunda Rosmala Dewi, S.Ag yang selalu mendoakan dan memberikan dorongan baik materil maupun non-materil, sehingga penulis dapat lancer dalam melaksanakan dan menyelesaikan skripsi ini.
3. Rektor UIN Raden Fatah Palembang Prof. Dr. Nyanyu Khodijah, S.Ag., M.SI
4. Ibu Dr. Endang Rochmiatun, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Adab dan Humaniora di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang beserta staf pimpinan lainnya, para dosen dan karyawan Fakultas Adab dan Humaniora yang telah memberikan pelayanan, perhatian, pengarahan dan bimbingan.

5. Bapak Dr. Mohammad Syawaluddin, M.Ag dan Bapak Nico Oktario Adytyas, M.A. selaku pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ketua Jurusan Politik Islam Bapak Dr Ahmad Syukri,S.IP, M.Si dan Sekretaris Jurusan Bapak Kiki Mikiail, M.A yang selalu memberikan motivasi untuk mendorong menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Keluargaku yang slalu ada dan slalu membantu dalam menyelesaikan Kuliah dan Skripsi ini.
8. Kepada IPNU, GMAN dan banom Fusphi yang menjadi Keluarga Keduaku yang slalu memberi masukan dan telah banyak membantu dalam perkuliahan maupun perskripsian ini.
9. Keluarga besar Politik Islam angkatan 2017, terimakasih atas semangat, kerjasama dan kebersamaannya selama menempuh kuliah di Fakultas Adab dan Humaniora.
10. Untuk Seluruh Teman–teman saya yang telah memberi *support*
11. Kepada PKB Kabupaten Lahat, KPU Kabupaten Lahat dan Masyarakat Kabupaten Lahat yang telah banyak membantu dan menjadi responden dalam Penelitian ini.
12. Kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan skripsi ini, semoga segala kebaikan kalian bernilai pahala disisi Allah SWT. Amiiin Peneliti menyadari dalam penelitian ini masih terdapat berbagai kekurangan baik dalam tulisan maupun hasil penelitian yang tertuang didalamnya. Untuk itu dengan segala kerendahan hati peneliti menerima kritikan dan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

AkhirulKalam,semoga tulisan ini bernilai pahala disisi Allah SWT dan bermanfaat bagi kita semua. Amiiin YaRabbal'amin.

Palembang, 1 November 2021
Penulis

Robbi Wahyudi
NIM.1710404010

Abstrak

Kajian Politik Islam
Program Studi Politik Islam
Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang
Skripsi, 2021

Robbi Wahyudi, **Strategi PKB Kabupaten Lahat dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat muslim pada pemilu legislatif 2019 studi kasus dapil 1.**

75 Hlm + Lampiran

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2019 (biasa disingkat Pemilu Legislatif 2019) diselenggarakan pada 17 April 2019 untuk memilih DPR maupun DPRD se-Indonesia periode 2019–2024. Pemilu Legislatif tahun tersebut dilaksanakan bersamaan dengan Pilpres 2019.

Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis fenomena menarik di dapil 1 Kabupaten Lahat dimana PKB berhasil menjadi partai yang berideologikan agamis dengan suara terbanyak mengalahkan partai lainnya, oleh karena itu peneliti ingin melihat strategi PKB Kabupaten Lahat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat muslim dalam pemilu legislatif 2019 studi kasus dapil 1 dengan cara melihat apa saja faktor pendorong dan faktor penghambat yang di alami oleh aktor politik PKB di dapil 1 yaitu Parisman sebagai ketua DPC PKB Lahat, Andriansyah anggota DPRD terpilih di dapil 1 dan Ahmad syahri, S.Hi sebagai waka 1 PKB Lahat, peneliti juga melihat program apa saja yang dilakukan oleh aktor politik PKB di dapil 1.

Jenis penelitian ini adalah Kualitatif, pendekatan yang digunakan adalah Deskriptif, teknik pengumpulan datanya melalui wawancara Dan dokumentasi

Hasil Penelitian ini adalah menjabarkan dan menjelaskan seperti apa strategi dan program yang dilakukan PKB dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilu legislatif 2019 di bandingkan dengan pemilu legislatif 2014, selain itu apa saja yang menjadi program unggulan yang di buat PKB dalam hal ini aktor politiknya dalam menarik minat masyarakat perlahan lahan semakin sadar pentingnya berpartisipasi dalam politik terkhususnya berpartisipasi melalui PKB. Dalam penelitian ini aktor politik PKB dalam mendekati masyarakat melalui aktor politik banyak melakukan pendekatan-pendekatan seperti Faktor sosial ekonomi, faktor nilai budaya, faktor sosiologi faktor psikologis, dan program unggulan yang di buat oleh PKB Lahat dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat adalah membuat Pendidikan dasar politik, membuat banom-banom untuk menyentuh setiap lapisan masyarakat, mengadakan pengajian rutin, dan Roadshow ke Pondok pesantren.

Kata Kunci : Pileg 2019, Partisipasi Politik, Aktor Politik.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	i
NOTA DINAS KOMPREHENSIF PEMBIMBING I	ii
NOTA DINAS KOMPREHENSIF PEMBIMBING II.....	iii
NOTA DINAS MUNOQOSAH PEMBIMBING I.....	iv
NOTA DINAS MUNOQOSAH PEMBIMBING I.....	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
SURAT PERNYATAAN	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHASAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xv
BAB I.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Batasan Masalah.....	12
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian	12
F. Tinjauan Pustaka	13
G. Kerangka Teori.....	16
H. Metode Penelitian.....	20
I. Metode Pengumpulan Data	22
J. Sistematika Penulisan	27
BAB II	29
A. Sejarah Kabupaten Lahat	29

B. Struktur Organisasi Pemerintahan Kabupaten Lahat	32
C. Visi dan Misi Kabupaten Lahat	35
D. Demogafis Masyarakat Kabupaten Lahat	37
E. Keadaan Sosial dan Politik Kabupaten Lahat	42
BAB III	51
A. Faktor Pendorong dan Penghambat PKB.....	60
B. PKB dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat muslim	67
BAB IV PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	74
A. Buku	74
B. Jurnal/Skripsi	75
C. Internet / Referensi lain.....	75
D. Wawancara.....	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	76

DAFTAR TABLE

Table 1.0 Pimpinan DPRD Kabupaten Lahat	28
Table 1.1. Jumlah pemeluk agama di Kabupaten Lahat	32
Table 1.2. Jenis pekerjaan masyarakat di Kabupaten Lahat	33
Table 1.3. Angka persentase sekolah penduduk di Kabupaten Lahat	34
Table 1.4. Jumlah pengajar dan tenaga pendidik di Kabupaten Lahat	36
Table 1.5. Pembagian wilayah Dapil di Kabupaten Lahat	44
Table 1.6 Perbandingan perolehan kursi di DPRD Kabupaten Lahat	45
Table 1.7. Perolehan suara di Dapil 1 Kabupaten Lahat	47
Table 1.8. Perolehan suara PKB di Dapil 1 Kabupaten Lahat	49

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.0 Struktur pemerintahan di Kabupaten Lahat	27
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.0 Peta Kabupaten Lahat	25
---------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1	76
LAMPIRAN 2.....	77
LAMPIRAN 3.....	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Partai politik adalah organisasi atau lembaga yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945¹

Fungsi partai politik di tertuang pada undang-undang No 2 Tahun 2011 pada pasal 11 ayat (1) partai politik berfungsi sebagai sarana (a) pendidikan politik bagi warga anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, (b) penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa indonesia untuk kesejahteraan masyarakat, (c) penyerap, penghimpunan dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara, (d) partisipasi politik warga negara indonesia dan (e) rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan partai

¹ Pasal 1, UU Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011

politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Dalam pembahasan ini akan memfokuskan tentang strategi-strategi Partai PKB PC Kabupaten Lahat dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat muslim dikarenakan partai mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam rangka menggerakkan partisipasi masyarakat muslim dalam sebuah pemilihan umum.

PKB Kabupaten Lahat di pilih karena peneliti menganggap PKB adalah salah satu partai pemenang Pemilu legislatif 2019 untuk tingkat nasional maupun tingkat Kabupaten Lahat, PKB berhasil meraih simpati dan dukungan dari masyarakat muslim yang menjadi target utama mereka dalam mendulang suara.

Pada tanggal 21 Mei 1998, mahasiswa dan segenap masyarakat Indonesia berhasil menurunkan Presiden Soeharto akibat tuntutan arus reformasi, peristiwa ini juga menjadi penanda berakhirnya masa Orde Baru dan lahirnya era Reformasi

Pada masa Reformasi ini keran kebebasan berpendapat dan hak-hak demokrasi bagi masyarakat Indonesia di buka selebar-lebarnya setelah sebelumnya pada masa Orde Baru merupakan pemerintahan yang otoriter, banyak pihak, kelompok dan golongan yang bersepakat untuk mendirikan Partai politiknya masing-masing.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia juga menerima banyak usulan dari NU di seluruh pelosok tanah air, usulan yang diterima PBNU sangat beragam namun usulan yang paling banyak masuk adalah harapan dari warga Nahdliyin untuk PBNU segera membentuk partai politik.

Berdasarkan Usulan tersebut PBNU mengadakan Rapat Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU pada tanggal 3 Juni 1998. Forum ini menghasilkan keputusan untuk membentuk Tim Lima yang diberi tugas untuk memenuhi aspirasi dan keinginan warga NU.

Tim lima dipimpin oleh KH. Ma`ruf Amin (Rais suriyah PBNU), dengan anggota, KH. M. Dawam anwar (Katib aam PBNU), Dr. KH. Said aqil siroj, M.A. (Wakil katib aam PBNU), H. M. Rozy munir, SE., M.Sc. (Ketua tanfidziyah PBNU), dan Ahmad bagdja (Sekretaris jenderal PBNU).

Selanjutnya, untuk memperkuat dan mengoptimalkan kinerja dari Tim lima seiring semakin banyaknya usulan dan keinginan dari warga NU yang menginginkan adanya partai politik, maka rapat Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU pada tanggal 20 juni 1998 memberi mandat kepada Tim lima.

Selain Tim lima dibentuk juga tim asistensi yang diketuai oleh Arifin djunaedi (Wakil Sekjen PBNU) dengan beranggotakan H. Muhyiddin arubusman, H. M. fachri thaha ma`ruf, Lc., Drs. H ABdul aziz, M.A., Drs. H Andi muarli sunrawa, H. M. Nasihin hasan, H. Lukman saifuddin, Drs. Amin said husni, dan Muhaimin iskandar. tim asistensi bertugas membantu Tim lima dalam menginventarisasi dan merangkum semua usulan warga NU yang ingin membentuk partai politik baru.

Berkelang dua hari dari rapat sebelumnya yaitu pada tanggal 22 juni 1998 Tim lima dan tim asistensi mengadakan rapat untuk merancang dasar dan menentukan tugas-tugas pokoknya. tanggal 26 - 28 juni 1998 tim lima dan tim asistensi mengadakan rapat lanjutan di villa la citra cipanas untuk menyusun rancangan awal pembentukan partai politik. pertemuan ini menghasilkan lima konsep dasar, yaitu pokok-pokok pikiran NU mengenai reformasi politik, mabda` siyasi, hubungan partai politik dengan NU, AD/ART dan Naskah deklarasi.

Sang inisiator pembentukan partai politik bagi warga NU, K.H. Abdurrahman wahid atau yang sering di sapa dengan akrab Gus dur perihatin bahwa ada kelompok lain yang ingin mendirikan partai politik NU. lantaran ini terkesan mengaitkan agama dan politik partai, pada akhir juni 1998,

sikapnya melunak dan bersedia menginisiasi kelahiran partai politik berbasis ideologi Ahlulsunah wal jamaah atau biasa di singkat Aswaja.

Keinginan Gus dur mendapat dukungan dari tokoh-tokoh deklarator lainnya, yaitu K.H Munasir ali, K.H. Ilyas ruchiyat, K.H. A. Mustofa bisri serta K.H. A. Muchith muzadi. proses selanjutnya, penentuan nama partai disahkan melalui hasil musyawarah tim asistensi lajnah, tim lajnah, tim NU, tim asistensi NU, perwakilan wilayah, para tokoh pesantren, dan tokoh masyarakat, usai pembentukan Partai Kebangkitan bangsa deklarasi pun dilaksanakan di Jakarta pada 29 rabiul awal 1419 h atau 23 juli 1998.²

Keberhasilan partai dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat muslim dalam pemilu sangat ditentukan oleh strategi partai dalam sosialisasinya, himbauan dan sarannya dalam mempengaruhi warga masyarakat muslim atau juga sangat ditentukan oleh strategi partai tersebut dalam menggunakan kewenangan sebagai sebuah partai politik. Dengan demikian, maka peran partai dengan partisipasi politik mempunyai hubungan yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan, karena apabila peran dari partai semakin baik maka partisipasi politik juga akan semakin meningkat..

² Effendy Choirie, *Islam-Nasionalisme UMNO-PKB* (Bandung: CV. ALFABETA , 2015) hal 5

Masyarakat muslim atau masyarakat islam yang menjadi penyumbang suara terbesar PKB di kabupaten Lahat diartikan sebagai sekelompok manusia hidup terjaring kebudayaan Islam, yang diamalkan oleh kelompok itu sebagai kebudayaannya kelompok itu bekerjasama dan hidup berdasarkan prinsip-prinsip kitab suci Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam tiap aspek kehidupan.

Masyarakat muslim juga diartikan sebagai suatu masyarakat yang universal, yakni tidak rasial, tidak hanya diyakini oleh bangsa tertentu dan tidak pula terbatas di dalam lingkungan batas-batas geografis. Dia terbuka untuk seluruh anak manusia tanpa memandang jenis, atau warna kulit atau bahasa, bahkan juga tidak memandang agama dan keyakinan/aqidah.

Masyarakat dalam pandangan Islam merupakan alat atau sarana untuk melaksanakan ajaran-ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bersama. Karena itulah masyarakat harus menjadi dasar kerangka kehidupan duniawi bagi kesatuan dan kerjasama umat menuju adanya suatu pertumbuhan manusia yang mewujudkan persamaan dan keadilan.

Pembinaan masyarakat haruslah dimulai dari pribadi-pribadi masing-masing wajib memelihara diri, meningkatkan kualitas hidup, agar dalam hidup wajib memelihara diri, meningkatkan kualitas hidup, agar dalam hidup di tengah masyarakat itu, di samping dirinya berguna bagi masyarakat, ia juga tidak merugikan antara lain.

Islam mengajarkan bahwa kualitas manusia dari suatu segi bisa dipandang dari manfaatnya bagi manusia yang lain. Dengan pandangan mengenai status dan fungsi individu inilah Islam memberikan aturan moral yang lengkap kepadanya. Aturan moral lengkap ini didasarkan pada waktu suatu sistem nilai yang berisi norma-norma yang sama dengan sinar tuntutan religious seperti: ketaqwaan, penyerahan diri, kebenaran, keadilan, kasih sayang, hikmah, keindahan dan sebagainya³.

Di Indonesia, misalnya, sebagai negara yang memiliki lima agama yang di akui di Indonesia Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu, peran partai tentulah sangat besar dalam menentukan arus politik dalam sebuah pemilihan umum.

Partisipasi politik mencakup semua kegiatan sukarela melalui mana suatu partai turut serta dalam proses pemilihan pemimpin-pemimpin politik, dan turut serta secara dalam pembentukan kebijakan umum. Kegiatan ini mencakup kegiatan memilih dan pemilihan umum suatu partai dapat memberi contoh yang baik, misalnya saja pemilihan presiden yang di adakan pada empat tahun sekali itu adalah momen yang sangat penting bagi para masyarakat dan Indonesia disinilah bagaimana moment suatu partai dalam

³ Dra. Nani Machendrawaty, M.Ag., *Pengembangan Masyarakat Islam* (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2017), hlm. 8.

menyusun strategi untuk mengajak masyarakat untuk berpartisipasi agar semua dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum karena dalam salah satu tujuan terpenting dalam pemilihan umum adalah memilih pemimpin yang berkualitas dan mampu menjadi representasi masyarakat tersebut. Agar rakyat Indonesia mendapat hidup yang lebih Makmur.

Ada beberapa ahli terdepan yang memberikan arti politik menurut mereka masing masing, misalnya Sokrates,Plato, Aristoteles dan kemudian Machiavelli yang merupakan pemicu gelombang cara berfikir baru dalam lapangan politik, hobbes (sementara Locke dan Rousseau praktis melanjutkan gagasan dasar Hobbes dengan polesan-polesan di beberapa bagian tema-tema pemikiran seputar the stte of nature dan konsekuensi-konsekuensinya).
(Dewantara,2018: 52).

Ada beberapa garis besar yang dapat diambil dari berbagai definisi di atas, yaitu, politik itu menyangkut tata hidup bersama. Ia menyoal sistem dan dasar pemerintah, kebijakan, tindakan bersama, politik itu menyentuh bidang intelektual (pengetahuan), dan juga praktis (tindakan dalam menghadapi sesuatu) pengertian ini sebenarnya bisa di pertajam dengan banyak teori-teori lainnya.*(Dewantara, 2018: 52-53).*

No Partai	Partai Politik	Suara Sah	Jumlah Kursi
1	Partai Kebangkitan Bangsa	7.934	1
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	6.488	1
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	6.049	1
4	Partai Golongan Karya	3.077	1
5	Partai Nasdem	4.874	1
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	251	-
7	Partai Berkarya	685	-
8	Partai Keadilan Sejahtera	2.960	1
9	Partai Persatuan Indonesia	2.752	-
10	Partai Persatuan Pembangunan	4.979	1
11	Partai Solidaritas Indonesia	48	-
12	Partai Amanat Nasional	3.119	1

13	Partai Hati Nurani	7.215	1
14	Partai Demokrat	8.182	1
19	Partai Bulan Bintang	2.498	-
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	31	-
	Jumlah	61.142	10

Sumber : KPU Kabupaten Lahat

Alasan peneliti untuk meneliti di Kabupaten Lahat dikarenakan peneliti melihat bahwasanya pada Pilkada Tahun 2019 kemarin, ada fenomena menarik dimana PKB sebagai partai yang berideologikan partai Islamis berhasil memenangi dapil 1 dengan suara terbanyak ke 2 setelah demokrat dan mampu mengalahkan partai yang berideologikan islamis lainnya, merujuk pada hal tersebutlah peneliti melihat strategi partai sangat berpengaruh dalam keterlibatannya pada pilkada, hal ini dibuktikan oleh lembaga survei LSI yang mengatakan bahwa pemilu 2019 memiliki angka golput paling rendah pasca reformasi, berdasarkan data yang di keluarkan oleh KPU Kabupaten Lahat Partai PKB menjadi partai berideologikan agamis yang mendulang suara paling banyak di dapil 1, Melihat pemaparan di atas, penulis tertarik untuk meneliti strategi partai PKB PC Kabupaten Lahat di dapil 1 kabupaten Lahat

yang dimana partai berperan terhadap kegiatan yang ada dalam masyarakat yang salah satunya tentang pemilihan umum, maka dari itu penulis tertarik untuk membuat judul skripsi dengan judul “Strategi Partai PKB PC Kabupaten Lahat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat muslim di pemilu legislatif 2019 studi kasus dapil 1”.

B. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan pemahaman dalam penelitian, maka penulis perlu membatasi permasalahan dalam penelitian ini pada peran Partai PKB PC Kabupaten Lahat dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat muslim kabupaten lahata dapil 1 di Pemilu legislatif 2019.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apa faktor pendukung dan penghambat PKB Kabupaten Lahat dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat muslim di Pemilu legislatif 2019?
2. Bagaimana Strategi PKB Kabupaten Lahat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat muslim Studi kasus dapil 1 Kabupaten Lahat?

C. Batasan Masalah

Dalam sebuah penelitian sejatinya diperlukan batasan masalah dengan tujuan tidak terjadinya pelebaran fokus penelitian. Peneliti membatasi masalah yaitu bagaimana tim pemenangan dari PKB kabupaten Lahat dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat muslim yang berada di dapil 1 kabupaten Lahat pada pilkada legislatif 2019.

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi partai PKB PC Kabupaten Lahat dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat muslim di dapil 1 pada Pemilu legislatif 2019. Dan apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat muslim di dapil 1 pada Pemilu legislatif 2019.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis:

1. Memberikan sumbangan secara ilmiah dan akademis terhadap pengembangan teori politik terkait strategi partai politik.

2. Sebagai masukan bagi masyarakat guna memberikan pengetahuan politik terhadap masyarakat agar dapat meningkatkan partisipasinya dalam pembangunan politik di Kabupaten Lahat.

Manfaat praktis:

- a. Bagi peneliti, merupakan bahasan informasi yang dapat dikembangkan ke berbagai aspek peneliti dan menambah pengetahuan dalam mengetahui strategi partai politik di masyarakat.
- b. Bagi partai politik, merupakan langkah yang penting untuk dijadikan bahan perbandingan agar dapat meningkatkan peran yang lebih luas di masyarakat umum.
- c. Selain itu juga sebagai syarat untuk memperoleh gelar pendidikan starsa satu (S1) dalam Jurusan Politik Islam.

F. Tinjauan Pustaka

Kajian mengenai strategi partai politik dalam pemilu legislatif 2019 sudah banyak dikaji sebelumnya, akan tetapi strategi partai dalam setiap daerah berbeda-beda dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Oleh karena itulah dalam penelitian ini penulis mengambil beberapa tinjauan dari beberapa penelitian sebelumnya yang dinilai relevan terhadap penelitian ini.

Pertama, dalam penelitian *Edy sanjaya sitepu* yang berjudul “*Peran partai Keadilan Sejahtera dalam meingkatkan partisipasi politik masyarakat pada pilkada*

Kota Medan tahun 2015 “ menjelaskan mengenai bahwa peran partai dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat melalui pendidikan politik dan TOP (*Training Orientation Partai*) kepada masyarakat kota medan oleh pengurus partai terhadap masyarakat yang didasarkan pada fungsi partai. Tanggung jawab inilah yang kemudian mendorong partai untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat untuk turut aktif dalam pilkada yang dilaksanakan di kota medan. Peranan dari partai politik tersebut di atas secara tidak langsung bisa meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Karena sesungguhnya pendidikan politik merupakan suatu proses yang memungkinkan seorang individu bisa mengenali sistem politik, yang kemudian menentukan sifat persepsi-persepsinya mengenai politik serta reaksi-reaksinya terhadap gejala politik.

Kedua, dalam penelitian *Baharudin. N, S.H.S.ip* dengan judul “*Optimalisasi peran partai politik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu legislatif berdasarkan UU no 2 Tahun 2008 tentang partai politik*” dalam penelitian ini menitikberatkan pada optimalisasi peran partai politik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat muslim pada pemilu legislatif berdasarkan UU no tahun 2008 tentang partai Politik, dimana studi di lakukan di kalimantan barat dan dapat di simpulkan dari penelitian ini peran partai politik belum optimal di sebabkan oleh egosentris dan arogansi partai politik, rekrutmen politik yang kurang tepat, masyarakat dijadikan objek bukan subjek. Dari hal tersebut lah yang membuat kurangnya peran partai dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

Ketiga, dalam penelitian yang disusun *Chindy Astria O. Hutagalung* dengan judul “ *Peran partai Golkar dalam meningkatkan partisipasi politik berdasarkan ketentuan pasal 10 peraturan pemerintah no 83 tahun 2012* “. Dari penelitian di atas menjelaskan peran partai Golkar dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat kota Semarang belum sesuai, karena dari penelitian ini diketahui banyak masyarakat yang cenderung tidak peduli, banyak masyarakat yang enggan memahami dan menerapkan kegiatan politik yang dilakukan partai politik, mereka memilih acuh akibat kekecewaan terhadap partai politik tidak sesuai dengan apa yang di janjikan. dalam pelaksanaan pendidikan politik partai Golkar memiliki kendala-kendala seperti (1) masyarakat tidak sadar dengan politik (2) masyarakat datang dan menjalani pendidikan politik tetapi tidak memahami esensi dari pendidikan politik (3) pendidikan politik hanya dilaksanakan jika partai Golkar mengadakan acara, sehingga dapat dipastikan tidak efektif dan menyeluruh kepada masyarakat Kota Semarang.

Keempat dari penelitian yang disusun oleh *Ayub budi prayoga* dengan judul “ *Peran partai politik dalam memberikan pendidikan politik di masyarakat kabupaten Gresik studi kasus pada dewan pengurus cabang*. Penelitian ini mendeskripsikan peran dari DPC PKB Gresik serta faktor-faktor pendorong dan penghambat selama melakukan pendidikan politik, penelitian ini merekomendasikan perlu adanya perubahan dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat baik perubahan bentuk komunikasi, materi, setting atau tempat pelaksanaan, guna tercapainya tujuan sebenarnya dari pemberian pendidikan politik kepada masyarakat.

Kelima penelitian dari *Yulianto dwi saputro* pada tahun 2015 yang berjudul ” *Peran partai politik dalam pendidikan politik generasi muda dan implikasinya terhadap ketahanan politik wilayah (Studi di DPD II partai Golkar Kota Malang)*. Penelitian ini menggambarkan fenomena sosial yang kompleks terjadi di masyarakat hasil penelitian menunjukkan bahwa peran partai politik kepada kader muda maupun masyarakat masih sangat rendah karena metode yang dilakukan oleh partai politik sangat konseptual dan kurang aplikatif dan hal ini berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan serta pembuatan kebijakan politik.

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini lebih berfokus bagaimana PKB Kabupaten Lahat memenangkan dan meningkatkan partisipasi politik masyarakat muslim, sehingga PKB mampu memperoleh suara terbanyak di bandingkan dengan partai yang menggunakan corak islam lainya di dapil 1 kabupaten lahat pada pileg 2019.

G. Kerangka Teori

1. Pengertian Strategi

Kata strategi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti ilmu dan seni menggunakan semua sumber bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang dan damai

Secara etimologi strategi berawal dari turunan kata dalam Bahasa Yunani yaitu Stratagos, yang berarti ‘Komandan Militer’ paa zaman demokrasi Athen. Pada

awalnya kata ini dipergunakan untuk kepentingan militer saja tetapi kemudian berkembang ke berbagai bidang yang berbeda seperti strategi bisnis, olahraga, politik, catur, pemasaran dan lain-lain.

Michael E. Porter dalam artikelnya yang berjudul *Competitive Strategy* dalam *Harvard Business Review* (2016), menyatakan bahwa strategi adalah sekumpulan tindakan atau aktivitas yang berbeda untuk mengantarkan nilai yang unik. Adapun ahli yang menegaskan bahwa strategi terdiri atas aktivitas-aktivitas yang penuh daya saing serta pendekatan-pendekatan bisnis untuk mencapai kinerja memuaskan⁴

Menurut Johnson dan Scholes strategi merupakan arah serta ruang lingkup sebuah organisasi dalam jangka panjang yang mencapai keuntungan bagi organisasi melalui konfigurasi sumber daya dalam lingkungan yang mendatang, agar memenuhi keperluan pasar serta melengkapi harapan pemangku kepentingan.

2. Pengertian Partai Politik

Menurut Kamus besar bahasa Indonesia Partai merupakan perkumpulan (segolongan orang) yang seases, sehaluan, dan setuju terutama dalam bidang politik

Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan

⁴ Rachmat, *Manajemen Strategik*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2014) hlm 2.

anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945⁵

Fungsi partai politik di atur pada undang-undang No 2 Tahun 2011 pada pasal 11 ayat (1) partai politik berfungsi sebagai sarana (a) pendidikan politik bagi warga anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, (b) penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa indonesia untuk kesejahteraan masyarakat, (c) penyerap, penghimpunan dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara, (d) partisipasi politik warga negara indonesia dan (e) rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan partai politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Menurut Miriam Budiarjo Partai politik yaitu sebuah kelompok yang terorganisir dan anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama dengan suatu tujuan memperoleh kekuasaan politik dan juga merebut kedudukan politik secara konstitusional guna melaksanakan berbagai kebijakan mereka.⁶

⁵ Pasal 1, UU Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011

⁶ Budiharjo Miriam, Dasar-dasar ilmu politik, (Jakarta, Gramedia Pustaka, 2000), hlm 159.

3. Partisipasi politik

3.1. Pengertian partisipasi politik

Partisipasi menjadi salah satu prinsip mendasar dari good government, sehingga banyak kalangan menempatkan partisipasi sebagai strategi awal dalam mengawali reformasi 1998. Partisipasi berasal dari bahasa latin yaitu pars yang artinya bagian dan capere yang artinya mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Apabila digabungkan berarti “mengambil bagian”. Dalam bahasa inggris, partispate atau participation berarti mengambil bagian atau peranan. Jadi partisipasi berarti mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara (Suharno, 2004:102-103). Partisipasi politik adalah salah satu aspek penting suatu demokrasi. Partisipasi politik merupakan ciri khas dari modernisasi politik.

Adanya keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Oleh karena itu yang dimaksud dengan partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson adalah kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Selanjutnya Ramlan Surbakti memberikan definisi singkat mengenai partisipasi politik sebagai bentuk keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Menurut Miriam Budiarjo, menyatakan bahwa partisipasi

politik secara umum dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin Negara dan langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik (public policy).

H. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang menurut pada sistem aturan tertentu guna mencapai kegiatan hingga terlaksana secara rasional dan terarah dengan hasil yang optimal⁷. Jadi metode penelitian adalah kegiatan yang tersistem dan terarah guna mengkaji suatu objek secara ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam memperoleh data dan informasi tersebut adalah dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (Field Research) yaitu dengan cara mengunjungi langsung Tim Pemenangan PKB PC Kabupaten Lahat yang ditujukan untuk memperoleh data primer yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, kombinasi* (Bandung: CV. ALFABETA, 2015), hal. 81

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang memberikan gambaran secermat mungkin mengenai strategi PKB Kabupaten Lahat dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat muslim di pemilu legislatif 2019 studi kasus dapil 1 kabupaten Lahat.

3. Sampel

a) Sampel

Didalam penelitian ini, sampel yang diambil ialah Pengurus Partai PKB PC Kabupaten Lahat karena dianggap oleh peneliti banyak berperan aktif dalam Strategi peningkatan partisipasi politik di kabupaten Lahat, sampel berikutnya yaitu masyarakat yang ada di dapil 1 kabupaten Lahat. Sampel merupakan bagian dari Tim Pemenangan dan juga pengurus Partai tersebut.⁸

4. Jenis Data

Sumber data yang digunakan oleh peneliti terdiri dari :

a) Data primer

Sumber data primer adalah sumber yang memberikan data langsung dalam penelitian ini. Karena Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka sumber

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta,2014), h.80-81.

primernya adalah data-data yang diperoleh dari lapangan, yaitu data yang berasal dari pengurus Partai PKB PC Kabupaten Lahat yang yang terlibat dalam tim pemenangan dapil 1, data dari KPU Kabupaten Lahat pada Pileg 2019, dan sudut pandang dari masyarakat di dapil 1 Lahat.

b) Data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung dan penunjang dalam penelitian ini. Adapun sebagai data penunjang penelitian mengambil dari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini, mengumpulkan dokumentasi yang terkait dengan penelitian ini.

c) Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum dan jurnal ilmiah.

I. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data yang terdiri dari :

1. Metode Wawancara

Wawancara (Interview) dilakukan secara mendalam dan terperinci. Maksud dari interview ini adalah dengan mengumpulkan data melalui tanya jawab secara langsung dengan pengurus partai tersebut yang berkecimpung dalam langsung dalam pemenangan dapil 1 Kabupaten Lahat.

Sugiyono dalam hal ini mengemukakan bahwa interview adalah metode mengumpulkan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penyelidikan.⁹ Dengan demikian sumber sumber data yang diperlukan dalam penulisan proposal skripsi ini terjaga keasliannya. Agar bisa mendapatkan data atau informasi yang valid dan terjaga keasliannya maka digunakan pedoman wawancara. Pedoman wawancara dimaksudkan adalah instrumen yang digunakan sebagai sarana penunjang dan membantu dalam wawancara secara langsung ke lapangan oleh si peneliti dengan menggunakan sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci. Metode ini digunakan untuk tujuan mendapatkan data yang valid dan objektif. Dalam prakteknya, metode wawancara tersebut dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dan mendalam kepada para responden dan informan dalam rangka untuk memperoleh data yang berkaitan dengan

⁹Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, kombinasi* (Bandung: CV. ALFABETA, 2015), hal. 81

judul proposal skripsi yaitu, Strategi Partai PKB PC Kabupaten Lahat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu legislatif 2019 studi kasus dapil 1.

2. Observasi

Observasi adalah cara pengambilan data yang dilakukan penulis dengan cara menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standart lain untuk keperluan tersebut. Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara diamati secara langsung terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Observasi yang dilakukan dengan pengamatan langsung dalam penelitian, dimulai dengan rentang yang bersifat umum atau luas, kemudian terfokus pada satu permasalahan. Di dalam penelitian Observasi dapat dilakukan rekaman suara, rekaman gambar ataupun tes. Peneliti juga akan meneliti bagaimana cara komunikasi pengurus partai tersebut baik verbal atau pun non verbal, saat peneliti sedang melakukan wawancara.

3. Dokumentasi

Dokumen yang tergolong sumber informasi dalam penelitian ini antara lain menyangkut jumlah penduduk dan program-program atau hal-hal lain yang dianggap mendukung peneliti penelitian ini. Data-data yang berasal dari studi dokumentasi ini untuk selanjutnya dikelompokkan pada temuan umum

maupun khusus dalam penelitian ini. Dokumentasi yang penulis dapatkan yaitu berupa foto wawancara.

4. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi, Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berdeda. Sebagaimana dikenal, dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara bebas dan wawancara terstruktur. Atau, peneliti menggunakan wawancara dan observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Melalui berbagai perspektif atau pandangan diharapkan diperoleh hasil yang mendekati kebenaran. Karena itu, triangulasi tahap ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya. Dengan demikian, jika data itu sudah jelas, misalnya berupa teks atau naskah/transkrip film, novel dan sejenisnya, triangulasi tidak perlu dilakukan. Namun demikian, triangulasi aspek lainnya tetap dilakukan.

Triangulasi antar-peneliti dilakukan dengan cara menggunakan lebih dari satu orang dalam pengumpulan dan analisis data. Teknik ini diakui memperkaya khasanah pengetahuan mengenai informasi yang digali dari subjek penelitian.¹⁰

Setelah data-data terkumpul dengan baik dan sesuai dengan permasalahan maka langkah langkah selanjutnya adalah pengolahan data atau menganalisis data tersebut. Data-data tersebut supaya dapat berarti dan dapat dengan mudah dipahami maka data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode induktif. Metode induktif yaitu suatu cara pengambilan keputusan yang berangkat dari suatu peristiwa yang bersifat khusus kemudian fakta-fakta tersebut dijadikan untuk diambil kesimpulan yang bersifat umum. Metode tersebut akan digunakan untuk membahas penyusunan proposal skripsi penulisan tentang strategi PKB Kabupaten Lahat dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat muslim di pemilu legislatif 2019 studi kasus dapil 1. Setelah mendapatkan data yang diperlukan maka data tersebut dianalisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu metode yang digunakan bagi pengetahuan yang secara teknik penekanannya lebih pada

¹⁰ Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M. Si *“triangulasi dalam penelitian kualitatif”*(*gema*, 15 oktober 2010)

kajian peristiwa ataupun partisipan observation. Dan menggunakan metode analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana strategi tim pemenangan partai PKB PC Kabupaten Lahat dalam Meningkatkan Partisipasi Politik masyarakat muslim pada Pemilu legislatif 2019 studi kasus dapil 1.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah tempat dimana penelitian ini dilakukan. Mngacu pada lokasi ini yaitu wilayah tertentu. Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah dapil 1 kabupaten lahat, sumatera selatan.

J. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini, dibagi kedalam tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian isi dan bagian akhir. Dan dibagi kedalam lima bab, dengan tujuan untuk mempermudah memahami hasil penelitian ini nantinya, oleh sebab itulah penulis akan menguraikannya secara sistematis.

Bab I : Pendahuluan yang menguraikan tentang, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode penelitian, dan Sistematika Penulisan

Bab II : Gambaran umum lokasi penelitian meliputi tentang, Geografis dan Demografis lokasi penelitian

Bab III : Merupakan fokus utama dalam penulisan ini yang berisi seperti bagaimana PKB kabupaten Lahat dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat muslim di pileg 2019 studi kasus dapil 1 kabupaten Lahat

Bab IV: adalah penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini berupa pernyataan singkat yang merupakan jawaban dari masalah yang telah di bahas dalam masing-masing bab. Selanjutnya saran ini diberikan kepada pihak yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut dengan mengambil proyek penelitian yang sama, serta kepada para pembaca.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kabupaten Lahat

Kabupaten Lahat merupakan kabupaten yang berada di Sumatera selatan, pada tahun 1830 masa kesultanan Palembang masih dalam masa puncak kejayaannya, di Kabupaten Lahat telah mempunyai marga, marga-marga ini terbentuk dari sumbai-sumbai dan suku-suku yang mendiami sepanjang aliran sungai lematang dan ulu musi, marga tersebut seperti Lematang, Pasemahan, Lintang, Gumai, Tebing Tinggi dan Kikim. Marga merupakan pemerintahan untuk sumbai-sumbai dan suku-suku. Marga inilah merupakan cikal bakal keberadaan Kabupaten Lahat.

Pada saat Inggris menjajah Indonesia, Marga tetap ada dan pada masa penjajahan Belanda sesuai dengan kepentingan Belanda di Indonesia pada waktu itu pemerintahan di Kabupaten Lahat dibagi dalam afdelling (Keresidenan) dan onder afdelling (kewedanan) dari 7 afdelling yang terdapat di Sumatera Selatan oleh kolonial Belanda, di Kabupaten Lahat terdapat 2 (dua) afdelling yaitu afdelling Tebing Tinggi dengan 5 (lima) daerah onder afdelling dan afdelling Lematang Ulu, Lematang Ilir, Kikim serta Pasemahan dengan 4 onder afdelling. Dengan kata lain pada waktu itu di Kabupaten Lahat terdapat 2 keresidenan. Pada tanggal 20 Mei 1869

afdeling Lematang Ulu, Lematang Ilir,serta Pasemah beribu kota di Lahat dipimpin oleh PP Ducloux dan kedudukan marga pada masa itu sebagai anggota dari afdelling.

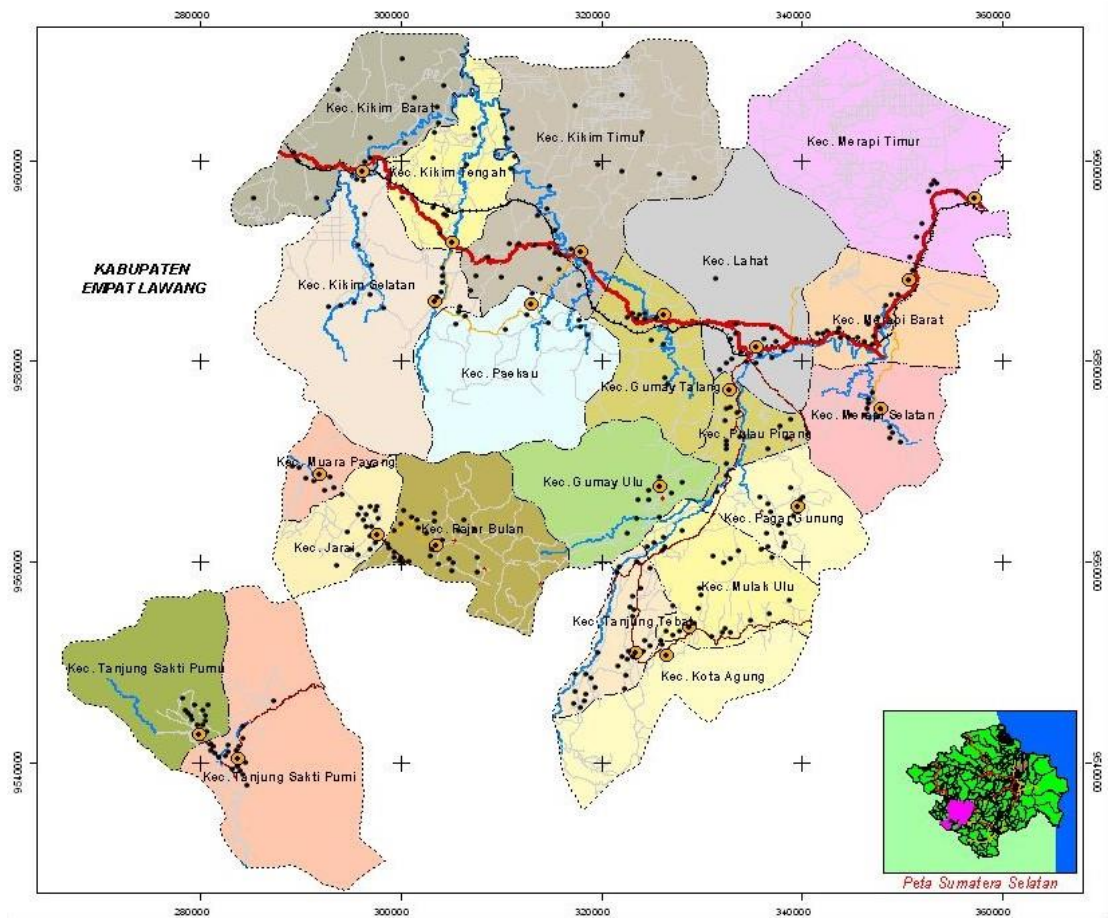
Masuknya kependudukan tentara Jepang pada tahun 1942 yang menggeser Kolonial Belanda, membuat afdelling yang dibentuk oleh Kolonial Belanda diubah menjadi sidokan dengan pemimpin orang pribumi yang ditunjuk oleh pemerintah militer Jepang dengan nama Gunco dan Fuku Gunco.

Kekalahan Jepang pada tentara sekutu di perang dunia ke dua pada tanggal 14 Agustus 1945 dan membuat bangsa Indonesia dengan cepat memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Kabupaten Lahat merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan sesuai UU No. 22 Tahun 1948, Kepres No. 141 Tahun 1950, PP Pengganti UU No. 3 Tahun 1950 tanggal 14 Agustus 1950. Kabupaten Lahat dipimpin oleh R. Sukarta Marta Atmajaya, kemudian ditukar oleh Surya Winata dan Amaludin dan dengan PP No. 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Tingkat I provinsi Sumatera Selatan.

Barulah pada tanggal 20 Mei diputuskan sebagai hari jadi Kabupaten Lahat sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan No. 008/SK/1998 tanggal 6 Januari 1988.

Kabupaten Lahat resmi sebagai daerah Tingkat II sampai sekarang dan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan diubah UU No. 32 Tahun 2004 menjadi Kabupaten Lahat.

Gambar 1.0 peta kabupaten Lahat



Sumber : BPS Kabupaten Lahat

Kabupaten Lahat yang luasnya 4.361,83 Km², Kabupaten Lahat pada tahun 2019 memiliki jumlah penduduk sebanyak 409.382 orang dengan kepadatan penduduk sebesar 87,76 orang per Km².

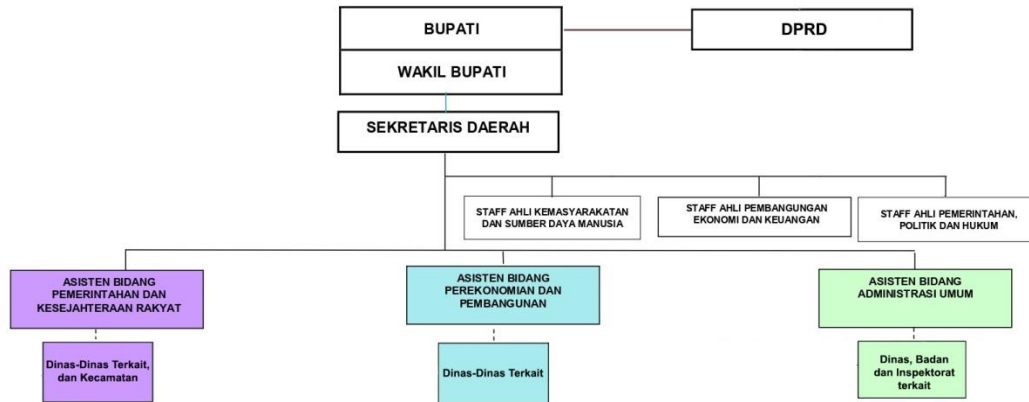
Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Muara enim dan Musi rawas, sebelah selatan berbatasan dengan Kota Pagar alam dan Kabupaten Bengkulu selatan, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Muara enim, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Empat lawang.¹¹

B. Struktur Organisasi Pemerintahan Kabupaten Lahat

Kabupaten Lahat di pimpin oleh Cik Ujang, SH dan H. Haryanto, SE., MM. periode 2018-2023 sebagai Bupati dan Wakil Bupati, Fitrizal Homizi, ST sebagai ketua DPRD Kabupaten Lahat periode 2019-2024 dari fraksi partai Demokrat, Nana Priana S.Hi sebagai ketua KPU Kabupaten Lahat, dan Bawaslu kabupaten Lahat dipimpin oleh Andra Juarsyah, M.Pd.

¹¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Lahat, *Lahat Dalam Angka* (Lahat in Figurs), 2019, hal.2

Bagan 1.0 Struktur Pemertintah daerah Kabupaten Lahat



Sumber : BPS Kabupaten Lahat

Setiap bagian dalam pemerintahan daerah memiliki peran dan fungsinya masing-masing, begitu juga dengan Bupati dan Wakil Bupati selaku pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi di kabupaten yang memiliki beberapa tugas pokok berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 yaitu :

1. Menjalankan kewenangan dan roda pemeritnahan daerah sesuai ketentuan dan peraturan yang di tetapkan bersama DPRD.
2. Memelihara ketertiban dan ketentranman masyarakat.
3. Menyusun dan mengajukan rancangan RPJPD dan rancangan perda untuk dibahas bersama DPRD.
4. Dan melaksanakan tugas lain sesusai peraturan perundang-undangan.

Tabel 1.0 Pimpinan DPRD Kabupaten Lahat

No	Jabatan	Nama	Partai Politik
1	Ketua	Fitrizal Homizi, S.T	Partai Demokrat
2	Wakil ketua 1	Gaharu, S.E, M.M	Partai Gerindra
3	Wakil Ketua 2	Sri Marheni Wulansih,S.H	Partai Golkar

Sumber : KPU Kabupaten Lahat

Sementara dalam bidang legislatif kekuasaan dipegang oleh Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD), adapun tugas pokok dari DPRD adalah sebagai berikut :

1. Membentuk peraturan daerah bersama Pemerintah Daerah
2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai APBD
3. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah
4. Meminta laporan pertanggung jawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
5. Dan melaksanakan tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan.

C. Visi dan Misi Kabupaten Lahat

Adapun visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat adalah sebagai berikut:

1. Visi

Visi adalah gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan suatu organisasi dalam hal ini pemerintah daerah.

Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat yaitu “ *Mewujudkan masyarakat kabupaten Lahat yang berahlaq, mandiri, berkeadilan, makmur, serta sejahtera serta terselenggaranya pembangunan yang berbasis pemerataan berkelanjutan.* “.

Maksud dari visi tersebut adalah Pemerintah Kabupaten Lahat ingin menciptakan masyarakat yang berahlaq, masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang mampu mendorong perubahan yang lebih baik lagi untuk masyarakat itu sendiri demi tercapainya kesejahteraan, pemerintah Kabupaten Lahat juga berupaya terciptanya pembangunan yang merata di setiap kecamatan maupun desa di Kabupaten Lahat.

2. Misi

Misi merupakan pernyataan tentang tujuan operasional pemerintahan daerah yang diwujudkan dalam produk dan pelayanan sehingga dapat

mengikuti perkembangan dunia, dan juga sebagai penjabaran dari visi yang telah disebutkan di atas, berikut adalah misi pemerintah daerah Kabupaten Lahat:

- a. Menciptakan pemerintahan yang bersih dan inovatif.
- b. Meningkatkan pembangunan infrastruktur publik berbasis pada pemerataan wilayah yang memadai dan efektif.
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berahlaq, sehat, cerdas, terampil, dan berkepribadian luhur.
- d. Menumbuhkan perekonomian rakyat menuju kedaulatan sumber daya alam yang tersedia.
- e. Memperkokoh kerukunan kehidupan beragama dan budaya yang lestari.¹²

Dari uraian misi di atas, pemerintah Kabupaten Lahat tengah berupaya dengan maksimal dalam merealisasikan misi tersebut namun kesumaann itu membutuhkan proses yang tidak singkat.

Visi dan Misi Kabupaten Lahat yang menjadi haluan pemerintahan Cik Ujang dan H.Haryanto di susun dengan baik dan diharapkan mampu merepresentasikan

¹² Badan Pusat Statistik Kabupaten Lahat, *Lahat Dalam Angka* (Lahat in Figures), 2019, hal.3.

masyarakat Kabupaten Lahat itu sendiri namun dalam implementasi visi dan misi tersebut menjadi program dan kebijakan masih banyak yang belum terealisasi.

Ada beberapa faktor yang membuat Pemerintahan Kabupaten Lahat yang dipimpin oleh Bapak Cik Ujang ini menjadi terhambat salah satunya yaitu pandemi Covid-19 yang membuat penyelenggaraan pemerintahan maupun realisasi program menjadi terhambat, terlebih karena sebagian besar dana APBD di gunakan untuk penanganan pandemi tersebut.

D. Demografis Masyarakat Kabupaten Lahat

Demografis adalah disiplin ilmu yang berbicara tentang susunan, jumlah maupun pertambahan penduduk dalam suatu wilayah atau Negara.¹³ Demografi berhubungan dengan kondisi penduduk, bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk suatu daerah dapat diketahui melalui data yang terdapat dalam demografi daerah itu sendiri, melalui demografi suatu daerah akan terbantu untuk melihat perkembangan penduduknya.

¹³ Sulchan Yasyin, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia Dengan EYD dan Kosa Kata Baru Dan Pengetahuan Umum Untuk Sltip, Smu dan Umum edisi revisi* (Surabaya:Amanah 2012), hlm 70

1. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data administrasi Badan pusat statistik kabupaten Lahat, kecamatan Lahat memiliki jumlah penduduk 409.382 Jiwa pada tahun 2019.

2. Jumlah Pemeluk Agama

Tabel 1.1 Jumlah pemeluk agama di kabupaten Lahat

No	Agama	Jumlah Pemeluk Agama
1	Islam	365.947
2	Protestan	4.185
3	Katolik	2.687
4	Budha	55
5	Hindu	20

Sumber : BPS Kabupaten Lahat

3. Pekerjaan Masyarakat

Pekerjaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk tujuan tertentu, dilakukan dengan cara yang baik dan benar, tindakan ini dilakukan oleh seseorang untuk keberlangsungan hidupnya dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Berikut ini tabel jenis pekerjaan masyarakat kabupaten Lahat berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) kabupaten Lahat pada 2017.

Tabel 1.2 Jenis Pekerjaan masyarakat Kabupaten Lahat

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan sejenisnya	73.416	44.293	117.709
2	Industri	3.240	258	3.498
3	Perdagangan, dan Jasa Akomodasi	3.240	16.347	19.587
4	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	10.445	11.303	21.748
5	Lainya	17.809	1.327	19.136
		111.242	73.528	184.770

Sumber : BPS Kabupaten Lahat

4. Tingkat Pendidikan

Pendidikan adalah suatu hal yang sangat penting dalam menunjukkan tingkat kesejahteraan pada umumnya. Dilihat dari golongan usia 7-12 tahun angka partisipasi sekolah (APS) Kabupaten Lahat pada tahun 2018 sebesar 98,28 persen yang artinya terdapat sebanyak 98 penduduk yang bersekolah pada usia 7-12 tahun dari 100 penduduk pada usia 7-12 tahun.

Angka partisipasi sekolah pada golongan usia 13-15 tahun sebesar 92,57 persen yang artinya dari 100 penduduk usia 13-15 tahun ditemui 91 orang yang bersekolah pada usia 13-15 tahun. Selanjutnya, APS untuk golongan usia 16-18 tahun sebesar 64,36 persen yang artinya pada tahun 2018, dari 100 penduduk usia 16-18 tahun terdapat 66 penduduk yang bersekolah pada usia 16-18 tahun.

Tabel 1.3 Angka presentase sekolah penduduk Kabupaten Lahat

No	Golongan Usia	Angka Presentase Sekolah (APS)
1.	7-12 Tahun	98,28%
2	13-15 Tahun	92,57%
3	16-18 Tahun	64,36%

Sumber : BPS Kabupaten Lahat

Mengingat bahwa penduduk Kabupaten Lahat masih tergolong penduduk muda, berarti mereka umumnya berada pada usia sekolah. Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana termaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 maka dibutuhkan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, terlebih lebih dalam rangka mensukseskan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.

Sampai tahun 2018 jumlah murid TK di Kabupaten Lahat 6.883 orang, dengan jumlah sekolah 88 buah dan rasio murid dan guru sebesar 11,53.

Pada tingkat pendidikan SD jumlah sekolah negeri yang ada di Kabupaten Lahat berjumlah 321 buah dengan jumlah murid 59.327 orang dan tenaga guru sebanyak 6.338 orang.

Jumlah Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 17 (tujuh belas) buah yang menampung murid sebanyak 1994 orang dengan tenaga pendidik 182 orang dan rasio murid dan guru sebesar 7,73.

Untuk tingkat pendidikan SLTP, sarana yang tersedia terdiri dari 73 buah sekolah negeri, dan 11 buah madrasah Tsanawiyah. Jumlah murid sekolah SLTP sederajat berjumlah 23.511 orang dengan tenaga guru berjumlah 2092 orang.

Pada tingkat pendidikan SMA jumlah sekolah yang tersedia terdiri dari 33 buah SMA, 6 buah MA dan 12 buah SMK. Jumlah murid untuk tingkat SMU berjumlah 24.340 orang, dengan total tenaga pengajar sebanyak 1.547 orang.¹⁴

Tabel 1.4 Jumlah pelajar dan tenaga pendidik di kab. Lahat

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pelajar	Jumlah tenaga Pendidik
1	TK	6.883	718
2	SD	59.327	6.338
3	SLTP	23.511	2.092
4	SLTA	24.340	1.547

Sumber : BPS Kabupaten Lahat

E. Keadaan Sosial dan Politik Kabupaten Lahat

1. Kondisi Sosial

Hubungan Sosial merupakan hubungan antara dua individu atau lebih yang melibatkan sikap, nilai, maupun harapan dalam mencapai kebutuhan sehari-hari. Hubungan social yang terjalin diantara mereka juga didasarkan pada hubungan

¹⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Lahat, *Lahat Dalam Angka* (Lahat in Figures), 2019, hal.15.

kerjasama dalam meningkatkan kelangsungan hidup di masa mendatang, hubungan sosial ini secara umum dapat memicu kegiatan social sehingga menjadi partisipatif baik sosial maupun politik

Kabupaten Lahat merupakan daerah yang didiami oleh berbagai suku bangsa dengan pemeluk agama yang berbeda-beda. Oleh karena itu keadaan social masyarakat di kabupaten Lahat sangat heterogen dan saling menghotmati satu dengan yang lainnya.

Hampir tidak pernah terjadi konflik antara masyarakat yang disebabkan oleh isu agama,ras maupun golongan tertentu, namun di Kabupaten Lahat ini sempat beberapa kali terjadi konflik antara masyarkat dan beberapa perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara, konlfik yang terjadi kebanyakan mempermasalahkan perihal jalanan yang menjadi rusak dan berdebu karena di lewati oleh kendaraan perusahaan tersebut, namun konlfik tersebut berhasil di tengahi oleh pemerintah Kabupaten Lahat

2. Kondisi Politik

Partisipasi politik merupakan istilah untuk menunjuk aktivitas politis masyarakat dalam menyalurkan aspirasi dan hak politiknya. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat termasuk memberkan hak suara untuk calon legislatif sangatlah penting, karena suara yang diberikan menentukan siapa representasi mereka lima tahun kedepan.

Demokrasi modern pada hari ini memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk menerapkan suatu mekanisme politik yang lebih berkeadilan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat bukanlah jabatan yang diberikan secara turun temurun tapi di pilih berdasarkan siapa yang mampu menjadi representasi dan mampu menjalin kedekatan dengan masyarakatnya itu sendiri.

Masyarakat kabupaten Lahat bukanlah tipikal masyarakat yang alergi dengan Politik, bahkan masyarakat kabupaten Lahat cenderung terbuka dalam pandangan politik, masyarakatnya cukup aktif dalam partisipasi politik baik itu dalam memberikan kritik dan saran maupun dalam pemilihan umum.

Namun masyarakat kabupaten Lahat dalam perilaku memilihnya seringkali yang mengutamakan memilih anggota keluarganya yang mencalonkan diri dalam pemilihan umum, tidak hanya itu masyarakat kabupaten Lahat juga sangat mudah di iming-imingi uang untuk memenangkan oknum tertentu atau hal ini biasa kita sebut *Money politics*.

Seharusnya masyarakat di kabupaten Lahat sudah mampu berfikir secara kritis dan Logis dalam suatu ajang kontestasi pemilihan umum, menjadikan gagasan, visi & misi maupun program sebagai indikator utama dalam menentukan pilihan di pemilihan umum.

Kabupaten Lahat memiliki 24 kecamatan yang di bagi menjadi 5 daerah pemilihan, adapun cara yang digunakan KPU dalam membagi pembagian dapil yaitu menggunakan prinsip kesetaraan nilai suara yaitu mengupayakan nilai suara atau harga kursi yang setara antara satu Dapil dengan Dapil lainnya dengan prinsip satu orang satu suara satu nilai. Penerapan prinsip ini dilakukan dengan cara menetapkan BPPD di kabupaten/kota, dengan juga mempertimbangkan jumlah penduduk di Dapil tersebut.¹⁵

Dari perolehan suara secara nasional membandingkan antara Pemilu legislatif 2014 dan pemilu legislatif 2019 PKB mengalami kenaikan satu tingkat dimana sebelumnya pada 2014 berada di posisi 5 pada 2019 berhasil naik ke posisi 4 dengan kenaikan jumlah suara PKB pada Pileg 2014 adalah 11.298.950 atau 9,04 persen. Sedangkan pada Pileg 2019 mendapatkan 13.570.097 suara atau 9,69 persen.

Berikut ini tabel pembagian wilayah dapil di kabupaten Lahat dan Jumlah Kursi di setiap dapil tersebut

¹⁵ Wawancara Bersama Bapak Nana Priana, S.H. Ketua KPU Kabupaten Lahat Pada Tanggal 22 Juni 2021, Pukul 10.07 Wib

Tabel 1.5 Pembagian wilayah dapil di Lahat

Nama Dapil	Wilayah Dapil (Kecamatan)	Jumlah Kursi
Lahat 1	Lahat	10
Lahat 2	Merapi Barat, Merapi Selatan, Merapi Timur	6
Lahat 3	Gumay Ulu, Kota Agung, Lahat Selatan, Mulak Sebingkai, Mulai Ulu, Pagar Gunung, Pulau Pinang, Tanjung Tebat	7
Lahat 4	Jarai, Muara Payang, Pajar Bulan, Suka Merindu, Tj Sakti Pumu, Tj Sakti Pumi.	8
Lahat 5	Gumay Talang, Kikim Barat, Kikim Selatan, Kikim Timur, Pseksu	9
	Total	40

Sumber : KPU Kabupaten Lahat

Hasil ini juga berbanding lurus dengan hasil Pileg 2019 yang terjadi di kabupaten Lahat PKB mendulang kenaikan jumlah suara maupun jumlah kursi di DPRD, untuk pemilihan legislatif di kabupaten Lahat, PKB mencalonkan sebanyak 40 orang laki-

laki dan 14 orang perempuan dengan presentase keterwakilan perempuan 36% di semua dapil.¹⁶

Tabel 1.6 perbandingan Perolehan kursi DPRD Lahat

No	Partai Politik	Jumlah Kursi	
		2014-2019	2019-2024
1	PKB	3	4
2	Gerindra	4	6
3	PDI-P	6	4
4	Golkar	5	5
5	NasDem	4	2
6	PKS	1	1
7	Perindo	(partai baru)	2
8	PPP	3	4
9	PAN	3	3

¹⁶ Wawancara Bersama Bapak Parisman, SEI Ketua DPC PKB Lahat Pada Tanggal 24 Juni 2021, Pukul 19.07 Wib

10	Hanura	3	2
11	Demokrat	4	6
12	PBB	3	1
13	PKPI	1	0
	Jumlah Kursi	40	40

Sumber : KPU Kabupaten Lahat

Dari semua dapil d kabupaten Lahat PKB mendapatkan 4 kursi di DPRD dengan suara terbanyak no 2 setelah Partai Demokrat dan merupakan partai yang berideologi Islam dengan suara terbanyak mengalahkan PKS, PPP, PBB dan PAN pada dapil 1.

Pada dapil 1 yang meliputi Kecamatan Lahat, PKB mencalonkan 10 calon legislatif, dari 10 calon legislatif ini ada beberapa tokoh yang memegang peran kunci dan menjadi actor politik dalam pemenangan pemilu dan peranya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat muslim di kecamatan Lahat seperti teori di atas, aktor-aktor politik yang memegang peran kunci ini bergerak secara terstruktur dan terorganisir.

Tabel 1.8 perolehan suara PKB di dapil 1 Lahat

No	Nama	Perolehan Suara
	Suara Partai	369
1	Ahmad Syahri Kurnianto, S.Hi	671
2	Edi Hiriansya	1.663
3	Erin Caterina S.,A.Md	38
4	Asim Kristian	1.244
5	Andriansyah	2.388
6	Hartika Yusman	77
7	Jonsi Hamka	29
8	Marlis	10
9	Yuni Astika, A.Md	34
10	Rabbi Pandu Angkasa, S.T	1.411
	Total Suara	7.934

Sumber : KPU Kabupaten Lahat

Dari sepuluh kandidat caleg tersebut saya memilih 3 orang yang menjadi narasumber yang menjadi aktor utama dalam penyusunan strategi PKB di dapil 1 yaitu Ketua DPC PKB Kabupaten Lahat Parisman, SE. anggota DPRD Kabupaten Lahat dapil 1 Andriansyah. dan Wakil ketua 1 DPC PKB Lahat Ahmad Syahri Kurnianto,S.Hi

BAB III

PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA

Pada bagian ini, peneliti akan mengeksplorasi pembahasan melalui hasil observasi, wawancara, analisa dokumen, secara kritis dan komperhensif, pada bagian ini juga kita akan melihat upaya atau strategi seperti apa saja yang di lakukan oleh DPC PKB Kabupaten Lahat dalam meningkatkan pastisipasi politik di dapil 1 kabupaten Lahat pada pemilihan legislatif 2019, tidak hanya itu saya juga melihat apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat PKB dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat muslim, sehingga mampu mendulang suara terbanyak kedua pada pileg 2019.

Dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tentang partai politik pasal 1 ayat 1, partai politik didefinisikan sebagai organisasi yg bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam perspektif kelembagaan, partai politik adalah lembaga yang menghubungkan antara rakyat dan pemerintah. Atau dalam bahasa lain, partai politik menjadi jembatan antara masyarakat sipil dengan pemerintah

Peran partai politik dirumuskan berdasarkan definisi peran dan definisi partai politik, yang kemudian dipermudah penentuannya dalam fungsi-fungsi partai politik, fungsi yang dilaksanakan partai politik menggambarkan peran yang akan dilakukan partai politik tersebut.

Adapun beberapa peran aktor dalam partai politik yang dapat dirumuskan berdasarkan fungsi-fungsi partai politik supaya kita lebih mudah dalam melihat seperti apa strategi yang dilakukan oleh PKB Kabupaten Lahat adalah sebagai berikut.

a. Komunikator Politik

Dalam komunikasi politik, komunikator politik merupakan salah satu faktor yang menentukan efektivitas komunikasi. Beberapa studi mengidentifikasi sejumlah karakteristik yang mempengaruhi kemampuan seseorang dalam hal ini aktor politik untuk mempengaruhi atau mengajak orang lain. Komunikator politik disini adalah orang yang secara tetap dan berkesinambungan melakukan komunikasi politik.

Meskipun setiap orang boleh berkomunikasi tentang politik, namun yang melakukannya secara tetap dan berkesinambungan jumlahnya relatif sedikit, walaupun sedikit, para komunikator politik ini memainkan peran sosial yang utama, terutama dalam proses opini dan isu publik. Dan Nimmo mengklasifikasikan komunikator utama dalam politik sebagai berikut: politikus; professional; dan aktivis.

1) Politikus

Politikus adalah orang yang bercita-cita untuk memegang suatu jabatan di pemerintahan, tidak peduli apakah mereka dipilih, ditunjuk, atau pejabat karier, dan tidak mengindahkan apakah jabatan itu eksekutif, legislatif, atau yudikatif. Daniel Katz (dalam Nimmo, 1989) membedakan politikus ke dalam dua hal yang berbeda berkenaan dengan sumber kejuangan kepentingan politikus pada proses politik. Yaitu: politikus ideolog (negarawan); serta politikus partisan.

Politikus ideolog adalah orang-orang yang dalam proses politik lebih memperjuangkan kepentingan bersama/publik. Mereka tidak begitu terpusat perhatiannya kepada mendesak tuntutan seorang langganan atau simpatisan kelompoknya. Mereka lebih menyibukkan dirinya untuk menetapkan tujuan kebijakan yang lebih luas, mengusahkan reformasi, bahkan mendukung perubahan revolusioner-

jika hal ini mendatangkan kebaikan lebih bagi bangsa dan negara. Sedangkan politikus partisan adalah orang-orang yang dalam proses politik lebih memperjuangkan kepentingan seorang langganan atau simpatisan kelompoknya.

Dengan demikian, politikus utama yang bertindak sebagai komunikator politik yang menentukan dalam pemerintah Indonesia adalah: para pejabat eksekutif (presiden, menteri, gubernur, dsb.); para pejabat eksekutif (ketua MPR, Ketua DPR/DPD, Ketua Fraksi, Anggota DPR/DPD, dsb.); para pejabat yudikatif (Ketua/anggota Mahkamah Agung, Ketua/anggota Mahkamah Konstitusi, Jaksa Agung, jaksa, dsb.).

2) Profesional Komunikator

Profesional Komunikator adalah peranan yang relatif baru, suatu hasil sampingan dari revolusi komunikasi yang sedikitnya mempunyai dua dimensi utama: munculnya media massa dan perkembangan serta merta media khusus (seperti majalah untuk khalayak khusus, stasiun radio, dsb.) yang menciptakan publik baru untuk menjadi konsumen informasi dan hiburan kelompok atau partai tertentu.

Baik media massa maupun media khusus mengandalkan pembentukan dan pengelolaan lambang-lambang dan khalayak khusus,

pereananya seperti mendoktrin dan menanamkan ideologi secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat, bukan hanya sebatas sosialisasi dan mengajak saja.

3) Aktivis

Aktivis adalah komunikator politik utama yang bertindak sebagai saluran organisasional dan interpersonal. Pertama, terdapat juru bicara bagi kepentingan yang terorganisasi. Pada umumnya orang ini tidak memegang ataupun mencita-citakan jabatan pada pemerintah; dalam hal ini komunikator tersebut tidak seperti politikus yang membuat politik menjadi lapangan kerjanya. Jurubicara ini biasanya juga bukan profesional dalam komunikasi. namun, ia cukup terlibat baik dalam politik dan semi-profesional dalam komunikasi politik¹⁷.

Richard E. Petty dalam jurnalnya *Attitudes and Persuasion: Classic and Contemporary Approaches*, dikatakan bahwa ada empat komponen yang harus ada pada komunikator politik, yaitu *communicator credibility*, *communicator attractiveness*, *communicator similarity* dan *communicator power*.

¹⁷ ¹⁷Dann Amino, "membaca gerakan aktor politik," *Jurnal Ilmiah aktor.*, *Agustus 2015 V, Nomor 2*.

a. Kredibilitas

Kredibilitas sumber mengacu pada sejauh mana sumber dipandang memiliki keahlian dan dipercaya. Semakin ahli dan dipercaya sumber informasi, semakin efektif pesan yang disampaikan. Kredibilitas mencakup keahlian sumber (source expertise) dan kepercayaan sumber (source trust worthiness).

b. Daya tarik

Daya tarik seorang komunikator bisa terjadi karena penampilan fisik, gaya bicara, sifat pribadi, keakraban, kinerja, keterampilan komunikasi dan perilakunya. Sebagaimana dikemukakan Petty “Two communicators may be trusted experts on some issue, by verbal and by the behavioral measure.” Daya tarik fisik sumber (source physical attractiveness) merupakan syarat kepribadian.

Daya tarik fisik komunikator yang menarik umumnya lebih sukses daripada yang tidak menarik dalam mengubah kepercayaan. Beberapa item yang menggambarkan daya tarik seseorang adalah tampan atau cantik, sensitif, hangat, rendah hati, gembira, dan lain-lain.

c. Kesamaan

Sumber disukai oleh audience bisa jadi karena sumber tersebut mempunyai kesamaan dalam hal kebutuhan, harapan dan perasaan.

Dari kacamata audience maka sumber tersebut adalah sumber yang menyenangkan (source likability), yang maksudnya adalah perasaan positif yang dimiliki konsumen (audience) terhadap sumber informasi.

d. Power Power

menurut Petty adalah “the extent to which the source can administer rewards or punishment.” Sumber yang mempunyai power, menurutnya, akan lebih efektif dalam penyampaian pesan dan penerimaannya daripada sumber yang kurang atau tidak mempunyai power. Pada dasarnya, orang akan mencari sebanyak mungkin penghargaan dan menghindari hukuman. Sebagaimana dikemukakan oleh Kelman, “people simply report more agreement with the powerful source to maximize their rewards and minimize their punishment.”¹⁸

Parisman S.E sudah memimpin DPC PKB Kabupaten Lahat sejak 2016-2021 dan kembali terpilih menjadi ketua DPC PKB Lahat untuk periode 2021-2026, parisman juga sempat menjabat anggota DPRD Kabupaten Lahat periode 2009-2014 dan 2014-2019.

¹⁸,Richard E. Petty” Attitudes and Persuasion : classic and contemporer persuasion,” Jurnal Ilmiah., Juni 2015 Volume 1, Nomor 3.

Andriansyah saat ini menjabat sekretaris umum DPC PKB Kabupaten Lahat periode 2021-2026, di DPRD kabupaten Lahat andriansyah sebagai wakil ketua komisi II, andriansyah sebelum menjadi anggota dewan aktif di organisasi pencinta alam Garis milang dan pengusaha kayu.

Ahmad Syahri Kurnianto atau biasa di sapa Gus Ayiek, wakil ketua 1 DPC PKB Kabupaten Lahat dan juga saat ini menjabat Ketua GP Ansor Kabupaten Lahat, gus ayiek merupan lulusan pondok pesantren Tebu ireng Jombang Jawa Timur dan menyelesaikan pendidikan strata satunya di UIN Syarif Hidayatulah, Syahri juga merupakan Jurnalis untuk beberapa media cetak maupun online di Lahat.

Dari ketiga Narasumber ini saya melakukan wawancara secara terpisah mengenai strategi PKB dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat muslim, dan menganalisis peran yang dimainkan ketiga tokoh ini.

Ketua DPC PKB Lahat Parisman memiliki peran sebagai Politikus dalam strategi ini, karena parisman dipandang oleh PKB memiliki posisi yang sentral dalam menyerap aspirasi masyarakat muslim dan menyuarakanya secara langsung di parlemen

Andriasyah merupakan Komunikator Poitik yang baik karena dinilai oleh PKB mampu menjalin komunikasi ke partai-partai lainnya, selain andriansyah yang sangat baik dalam pergaulan sehari-hari yang membuatnya mampu menjalin komunikasi dengan banyak orang, keluarga Andriansyah juga banyak menjadi pengurus partai lainya di Kabupaten Lahat.

Ahmad Syahri Kurnianto memiliki peran ganda yaitu Komunikator Politik sekaligus aktivis, Ahmad syari mampu mensosialisasikan program-program dari PKB Lahat melalui media online karena Ahmad syari merupakan salah satu dari pemilik media Lahat Online, bahkan Syahri masih aktif menulis untuk media tersebut, di samping itu juga menjabat sebagai Ketua GP Ansor Lahat dan Pengurus Nahdlatul ulama Lahat.

Ketiga orang ini memiliki peran penting dalam penyusunan formula strategi PKB yang mampu memiliki kedekatan dengan masyarakat muslim di Lahat.¹⁹

Masyarakat muslim di Kabupaten Lahat adalah masyarakat yang mampu menerima perbedaan suatu kelompok dengan kelompok lainya, karena kabupaten Lahat terdiri dari berbagai macam suku, agama dan ras sehingga menciptakan masyarakat yang tidak kaku mengenai keragaman budaya.

Di kabupaten Lahat juga banyak organisasi kemasyarakatan dan keagamaan yang aktif seperti Nahdlatul ulama, Muhammadiyah, LDII dan organisasi keagamaan lainya.

¹⁹ Wawancara Bersama Bapak Parisman, SE Ketua DPC PKB bersama Lahat Pada Tanggal 24 Juni 2021

A. Faktor Pendorong dan Penghambat PKB

Menganalisis strategi PKB kabupaten Lahat berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber PKB dan membandingkannya secara langsung dengan hasil wawancara dari masyarakat umum di Lahat dalam menjalin kedekatan dengan masyarakat muslim, maka akan menjabarkan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik. Meluasnya partisipasi politik dipengaruhi hal-hal ini berkaitan dengan sistem politik dan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat muslim di Kabupaten Lahat antara lain:

1. Faktor sosial ekonomi

kondisi sosial ekonomi meliputi tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, dan jumlah keluarga, faktor ini di mainkan sangat baik oleh aktor-aktor politik PKB dalam mendekati masyarakat muslim karena aktor politik PKB juga berasal dari berbagai macam keadaan social dan tingkat ekonomi dan mampu menjangkau setiap lapisan dari masyarakat itu sendiri, selain itu banyak program dari PKB yang bertujuan membantu memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi masyarakat seperti selalu hadir jika terjadi bencana atau keadaan darurat.

2. Faktor peran serta masyarakat

Faktor peran serta masyarakat didasarkan kepada politik untuk menentukan suatu produk akhir, faktor politik lain meliputi:

a. Komunikasi politik.

Komunikasi politik adalah suatu komunikasi yang mempunyai konsekuensi politik baik secara aktual maupun potensial, yang mengatur kelakuan manusia dalam keberadaan suatu konflik. Komunikasi politik antara partai dan masyarakat muslim sebagai interaksi antara dua pihak yang menerapkan etika.

Komunikator Politik PKB memiliki kedekatan yang sangat baik dengan Organisasi kemasyarakatan dan Organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama dan Badan otonom nya, tidak hanya dekat dengan ormas komunikator politik dari PKB juga mampu merangkul Pondok-pondok pesantren, bahkan PKB juga memiliki komunikasi yang baik dengan pemeluk agama lainnya, dari kedekatan tersebut aktor politik PKB menjalin komunikasi yang berkesinambungan guna menyerap aspirasi semua masyarakat di dapil 1 khususnya masyarakat muslim.

b. Kesadaran politik.

Kesadaran politik menyangkut pengetahuan, minat, perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik.

Guna meningkatkan kesadaran politik PKB secara teratur melaksanakan Pendidikan Dasar Politik kepada masyarakat dan simpatisan partai, terbukti sejak tahun 2016 semua sayap organisasi PKB seperti Perempuan Bangsa, Garda Bangsa melakukan pengkaderan dan pendidikan politik.

3. Pengetahuan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan.

Pengetahuan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan akan menentukan corak dan arah suatu keputusan yang akan diambil.

Dalam pengambilan keputusan PKB aktif dalam menyerap aspirasi masyarakatnya terutama masyarakat muslim itu sendiri, PKB merupakan salah satu partai pengusung Saifudin aswari rifai, S.E Bupati Kabupaten Lahat periode 2013-2018 dan juga PKB memiliki 3 kursi di DPRD Kabupaten Lahat sehingga suara dari PKB di perlukan oleh Pemereintah eksekutif dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Lahat di Parlemen atau di legilatif guna realisasi program kerja unggulan dari pemerintah saat itu.

4. Faktor fisik dan individu lingkungan.

Faktor fisik individu sebagai sumber kehidupan termasuk fasilitas serta ketersediaan pelayanan umum. Faktor lingkungan adalah kesatuan ruangan dan semua benda, daya, keadaan, kondisi dan makhluk hidup yang berlangsungnya berbagai interaksi sosial.

Basis masa utama PKB di kabupaten Lahat adalah masyarakat muslim itu sendiri, PKB aktif terlibat dalam membantu pembangunan tempat ibadah, bantuan untuk pondok pesantren, pesantren yang sering kali mendapatkan bantuan di kecamatan Lahat yaitu Pondok pesantren Al-Fatah Desa Pasar bawah, PKB juga selalu mensupport NU dalam setiap kegiatan dakwahnya.

5. Faktor nilai budaya menyangkut persepsi, pengetahuan, sikap, dan kepercayaan politik.

Pada periode 2014-2019 PKB di dapil 1 mendapatkan 1 kursi di DPRD dan 3 Kursi secara keseluruhan di semua dapil, dengan hanya mendapatkan 3 kursi PKB kabupaten Lahat, hasil ini bukanlah hasil yang buruk namun tidak bisa dikatakan hasil yang diinginkan oleh partai mengingat basis masyarakat muslim yang sangat besar di kabupaten Lahat.²⁰

²⁰ Wawancara Bersama Parisman, SE Ketua DPC PKB Lahat Pada Tanggal 24 Juni 2021

Oleh karena itu PKB tidak dapat menjadi unsur pimpinan (ketua,wakil ketua 1,wakil ketua 2) di DPRD Kabupaten Lahat, berkaca dari hasil pemilu 2014 tersebut PKB menyusun strategi yang lebih baik dan matang guna menghadapi pemilu 2019 dan meningkatkan kepercayaan politik terhadap PKB itu sendiri²¹

Selain faktor pendukung PKB juga memiliki beberapa faktor hambatan, yang pertama faktor yang dominan terjadi dikarenakan masyarakat dalam memilih masih mementingkan faktor struktual dan sosial yakni keluarga dan faktor dikotomi antara agama dan politik. Di dapil 1 kabupaten Lahat banyak calon legislatif yang menjadikan keluarganya sebagai basis kekuatan utama

Kemudian faktor sosiologi yang dipengaruhi latar belakang dan jejak historis, pada dapil 1 kabupaten Lahat PKB terlihat kurang memiliki tokoh yang memiliki jejak historis yang kuat, pada pileg 2014 ketua umum parisman berhasil terpilih untuk kedua kalinya di dapil 1 namun pada pileg 2019 parisman bertarung di dapil 3 karena di dapil tersebut PKB mengalami kekosongan kursi.

Beruntung karena aktor politik dan komunikasi politik yang baik PKB mendulang suara terbanyak kedua dengan 1 kursi di dapil 1, dan juga PKB memiliki kedekan terhadap ulama-ulama di dapil 1 yang membuat keputusan ulama tersebut juga menjadi pertimbangan masyarakat muslim kebanyakan.

²¹ Wawancara Bersama Nana Priana Ketua KPU Kabupaten Lahat Lahat Pada Tanggal 22 Juni 2021

Selain kurangnya tokoh calon legislatif PKB yang memiliki historis yang kuat di dapil 1 kabupaten Lahat juga terkenal rawan akan politik uang atau *money politics*, hal ini dapat dilihat dari Pilkada Kabupaten Lahat 2018 dimana Pengadilan Negeri Lahat menjatuhkan vonis 36 bulan penjara dan denda Rp 200 juta subsidi 1 bulan penjara kepada Syahril Effendi, terdakwa kasus praktik *money politics* di Pilkada Lahat.

Dalam putusannya Majelis Hakim PN Lahat, Shelly Noveriyati. SH menyebutkan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena dengan sengaja membagi-bagikan uang untuk memenangkan salah satu pasangan calon Pilkada 2018.

Selanjutnya faktor psikologis sosial, yang merujuk kepada masyarakat yang trauma terhadap pemimpin yang tidak membawa kemajuan terhadap masyarakat itu sendiri, karena sering kali calon legislatif yang setelah terpilih seperti lupa akan janjinya hal ini merujuk kepada semua partai yang mengikuti kontestasi politik di kabupaten Lahat²².

Hambatan yang dialami PKB pada pemilu legislatif 2019 di dapil 1 ialah dari 10 orang calon legislatif banyaknya calon yang seperti hanya memenuhi kursi dan

²² Wawancara Bersama Ahmad Syahri K., S.Hi S Waka 1 DPC PKB Lahat Pada Tanggal 24 Juni 2021

mendapatkan suara seadanya, padahal jika semua calon legislatif PKB benar-benar melakukan pendekatan kepada masyarakat khususnya masyarakat muslim yang menjadi target utama partai, bukan tidak mungkin PKB mendapatkan 2 kursi di dapil masyarakat juga mengatakan beberapa calon legislatif PKB kurang mempromosikan diri dan baru terdengar namanya pada saat detik-detik pemilu, semestinya PKB dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat muslim tidak hanya beberapa nama saja yang memiliki pamor dan juga sumber daya yang kuat namun saling membantu satu sama lain guna kepentingan partai

Dari berbagai hambatan yang dihadapi PKB dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pileg kabupaten Lahat 2019, PKB melakukan solusi dalam mengatasi hambatan tersebut ialah melalui pendekatan keagamaan seperti dakwah para ulama yang menyampaikan bahwa memilih pemimpin itu wajib hukumnya dan lebih meningkatkan lagi pendidikan politik sehingga masyarakat sadar betapa pentingnya memilih pemimpin untuk kemaslahatan masyarakat kabupaten Lahat agar masyarakat tidak trauma lagi dengan pemimpin yang terdahulu²³.

PKB juga melakukan kerjasama dengan KPU sebab bukan peran partai saja yang berfungsi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat tetapi KPU juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam pemilihan anggota Legislatif.

²³ Wawancara Bersama Andriansyah Sekjen DPC PKB Lahat Pada Tanggal 25 Juni 2021

B. PROGRAM PKB DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT MUSLIM

Partisipasi merupakan perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan atau peran serta. Peran politik terkait erat dengan aktivitas-aktivitas politik mulai dari peranan para politikus profesional, pemberian suara, aktivitas sampai demonstrasi. Secara umum apa-apa saja yang menjadi indikator bagi peran atau partisipasi politik adalah menarik apa yang ditawarkan.

Lembaga sosial telah berperan besar dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat seperti yang diungkapkan oleh Friedman dan Hechter yang menjelaskan adanya kemampuan dan lembaga sosial untuk memberikan sanksi positif dan negatif kepada masyarakat sehingga memengaruhi masyarakat untuk menentukan ikut berpartisipasi ataukah tidak. Dari penjelasan Friedman dan Hechter tersebut dalam permasalahan partisipasi politik lembaga sosial mampu memberikan dorongan kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam politik. Berdasarkan pengamatan peneliti, lembaga sosial yang turut berperan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat antara lain adalah KPUD, Partai Politik, Media Massa, dan Organisasi masyarakat

Peran Partai Politik, Partai politik dalam UU Nomor 2 tahun 2011 atas perubahan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik pada pasal 10 disebutkan: tujuan khusus partai politik adalah meningkatkan partisipasi politik anggota dan

masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan selanjutnya di pasal 11 dijelaskan partai politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sosialisasi dan pendidikan politik oleh partai politik sedikitnya dilakukan dalam tiga hal, yakni: melalui sosialisasi para kader, pendidikan politik, dan melalui optimalisasi organisasi sayap partai.

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan narasumber PKB, mereka sudah melaksanakan fungsi partainya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berpolitik, yang berupa memberikan pendidikan politik. Strategi yang digunakan PKB adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan Dasar Politik

Strategi yang pertama yaitu pendidikan dasar politik yakni mengumpulkan masyarakat dan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dan mahasiswa seperti pengenalan tentang PKB, dan pentingnya ikut serta dalam pemilihan kepala daerah karena hubungan agama dan politik tidak bisa dipisahkan.

Seharusnya Pendidikan dasar politik ini mampu dimaksimalkan lebih baik lagi oleh PKB karena Pendidikan yang dilakukan oleh PKB masih terlalu kaku dan formal mengingat kebanyakan milenial saat ini lebih senang dengan cara yang kekinian dan lebih santai

2. Pendidikan dasar Perempuan Bangsa, Gardabangsa, dan Gemasaba

Strategi yang kedua adalah mengadakan pelatihan kepada simpatisan dan kader PKB yang tergabung dalam sayap organisasi PKB seperti Perempuan Bangsa sebagai wadah Pemuda yang menjadi kader dan simpatisan PKB, Garda Bangsa untuk para pemuda dan untuk tingkat mahasiswa PKB Memiliki Gemasaba. Sayap organisasi ini merupakan salah satu strategi PKB guna menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Sayap organisasi PKB ini juga memiliki program mereka sendiri sesuai pasar massa mereka sendiri, wadah ini memiliki peran yang cukup baik dalam mengejar target massa di Lahat itu sendiri namun wadah ini hanya aktif di tingkat Cabang atau Kabupaten belum mampu di maksimalkan sampai tingkat anak cabang atau bahkan ranting di desa-desa.

3. PKB Mengaji & Manaqib

Strategi yang ketiga PKB mengaji dan Manaqib yakni pertemuan rutin antara kader PKB dengan masyarakat. Yang dimana kegiatan ini seperti pengajian, pelatihan membaca kitab Kuning, mendengarkan ceramah ustadz/ustadzah yang mengisi materi acara. kegiatan ini terbuka untuk masyarakat umum, tidak harus dari PKB saja yang bisa menghadirinya. Dan dari pengajian ini Partai PKB lebih mudah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berpolitik.

Program PKB kali ini menurut saya sudah efektif karena masyarakat sangat suka kegiatan keagamaan namun jadwal dari kegiatan ini seharusnya bias lebih rutin lagi, PKB melakukan kegiatan mengaji dan manaqib ini hanya sebulan sekali, jika saja PKB melakukan kegiatan ini lebih sering dan dengan bentuk kegiatan dan tempat yang lebih variatif tidak hanya selalu di secretariat PKB tentunya program ini akan mampu meraih massa yang lebih banyak lagi.

4. Roadshow ke Pondok pesantren Se-Kabupaten Lahat

Dan strategi yang ke 4 yaitu Roadshow ke pondok pesantren, PKB merupakan partai yang memiliki kedekatan dengan Pondok pesantren, oleh karena itu salah satu dari strategi PKB yaitu memberikan pendidikan politik sejak dini kepada santri di pondok pesantren tersebut.²⁴

Roadshow ini sudah cukup baik namun mengingat jumlah pelajar di kabupaten Lahat lebih banyak bersekolah di sekolah umum bukan sekolah madrasah keagamaan seperti pondok pesantren, program untuk memberikan pendidikan politik di tingkat pelajar ini akan lebih maksimal jika saja PKB lebih melebarkan sayapnya sampai kesekolah umum.

²⁴ Wawancara Bersama Bapak Ahmad Syahri K, S.Hi Wakil Ketua 1 DPC PKB Lahat Pada Tanggal 24 Juni 2021

Berdasarkan strategi di atas, PKB lebih condong meningkatkan partisipasi masyarakat dengan cara berdakwa. Sebab PKB ialah partai yang berideologikan Pancasila dan berdasarkan syariat Islam, namun PKB seharusnya mampu menjalin kedekatan yang lebih luas lagi tidak hanya mengandalkan isu keagamaan mengingat keadaan sosial masyarakat Kabupaten Lahat tidak terlalu berpatokan dengan ideologi partai tersebut melainkan masyarakat lebih sering melihat siapa tokoh tersebut, bahkan masih banyak masyarakat yang mampu terpengaruh dengan *Money politics*.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pilkada adalah Agenda Kontestasi politik yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali untuk memilih pemimpin yang di harapkan mampu menjadi representasi masyarakatnya dan mampu membawa daerah tersebut menjadi lebih baik lagi. Sudah menjadi tugas pokok partai untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakatnya, karena partai merupakan lembaga yang menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakatnya.

PKB Kabupaten Lahat sudah menjalankan tugas pokoknya dengan baik dalam rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat muslim dan meraih kemenangan dalam pemilihan legislatif 2019, banyak faktor pendorong dan faktor penghambat yang telah di hadapi PKB Kabupaten Lahat seperti faktor kondisi sosial, sosiologi, psikologis, sosial budaya Sehingga mampu menjadi salah satu partai pemenang di kontestasi pemilu legislatif 2019.

Strategi yang menjadi ujung tombak PKB dalam meraih simpati dan dukungan masyarakat bias dibilang cukup baik melihat angka partisipasi dari Pileg 2014 dan pileg 2019 berhasil meningkat, strategi tersebut disusun oleh aktor politik yang juga

memaikan peran yang sangat penting dan mampu menembus setiap lapisan masyarakat.

program unggulan yang di buat oleh PKB Lahat dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat adalah membuat Pendidikan dasar politik, membuat banom-banom untuk menyentuh setiap lapisan masyarakat, mengadakan pengajian rutin, dan Roadshow ke Pondok pesantren

Strategi tersebut di ubah menjadi program-program yang mampu memberikan pendidikan politik di samping juga mampu meraih simpati dan menjalin kedekatan dengan masyarakat muslim. Karena tidak semua partai yang berideologikan keagamaan yang mampu meraih simpati dan dukungan dari masyarakat muslim di kabupaten Lahat.

B. Saran

Saran yang diberikan oleh penulis yaitu seharusnya PKB Lahat mampu meraih suara lebih banyak lagi dan menjadi pemenang dalam pemilu legislatif 2019 jika saja PKB Lahat tidak hanya befokus di tingkat cabang atau Pengurus Kabupaten namun mampu menggerekan sampai ke tingkat pengurus ranting atau pengurus tingkat desa, karena jika setiap lapisan masyarkat sudah memiliki pemahaman akan politik dan memiliki kedekatan dengan suatu partai itu akan memudahkan masyarakat itu sendiri dalam menyampaikan aspirasinya

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Rachmat, *Manajemen Strategik*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2014) hlm 2.
- Budiharjo Miriam, *Dasar-dasar ilmu politik edisi revisi*, (Jakarta, Gramedia Pustaka, 2012), hlm 159.
- Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, (Jakarta: Konsitusi Press, 2013), hlm.5
- NorHuda, *Pedoman Akademik dan Dokumen Kurikulum* (Palembang : Fakultas Adab dan Humaniora UINRaden Fatah Palembang, 2017), hlm.15
- Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, kombinasi*(Bandung:CV. ALFABETA ,2015), hal. 81-82.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lahat, *Lahat Dalam Angka* (Lahat in Figurs), 2019, hal.2
- Tjahjo Kumolo, *Politik Hukum Pilkada Serentak*, (Jakarta: Expose, 2015), hlm.16
- Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M. Si “*triangulasi dalam penelitian kualitatif*”(gema,15 oktober 2010)

B. Jurnal/Skripsi

Richard E. Petty "Attitudes and Persuasion : classic and contemporary persuasion," Jurnal Ilmiah., Juni 2015 Volume 1, Nomor 3.

Dewantara "Peran tokoh agama dalam partisipasi politik di Indonesia" Jurnal Ilmiah, Juni 2019. Hlm 52

Mihael E. Porter "Strategi memenangkan persaingan (bagi perusahaan dan Negara)" Jurnal Ilmiah, Desember 2016. Hlm 21

Suharno "Hukum dan Warga Negara" Jurnal Ilmiah, Februari 2018. Hlm 3

Ramlan Subakti "Memperkuat Fungsi rekrutmen partai politik" Jurnal Ilmiah, Desember 2018. Hlm 16

C. Internet / Referensi lain

Pasal 1, UU Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011

Ketetapan KPU Kabupaten Lahat tentang perolehan kursi partai politik peserta pemilu legislatif 2019 di kabupaten Lahat

D. Wawancara

Wawancara Bersama Bapak Parisman, SE Ketua DPC PKB Lahat Pada Tanggal 24 Juni 2021, Pukul 19.07 Wib

Wawancara Bersama Bapak Andriansya Sekjen DPC PKB Lahat Pada Tanggal 25 Juni 2021, Pukul 15.09 Wib

Wawancara Bersama Bapak Ahmad Syahri Kurnianto, SE Ketua DPC PKB Lahat Pada Tanggal 24 Juni 2021, Pukul 20.07 Wib

Wawancara Bersama Bapak Nana Priana, S.H. Ketua KPU Kabupaten Lahat Pada Tanggal 22 Juni 2021, Pukul 10.07 Wib

LAMPIRAN 1

Nama : Parisman ,S.E

Jabatan : Ketua DPC PKB Kab Lahat



Nama : Andriansyah

Jabatan : Sekjen DPC PKB Kab Lahat

Anggota DPRD Kab Lahat



Nama : Ahmad Syahri K., S.Hi

Jabatan : WK 1 DPC PKB Kab Lahat



Nama : Nana Priana, S.H

Jabatan : Ketua KPU Kab Lahat



LAMPIRAN 2



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

Nomor : B-069 /Un.09/IV.1/PP.01/06/2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Mohon Izin Observasi

Kepada Yth.
Wakil Dekan I
Fakultas Adab dan Humaniora
UIN Raden Fatah
di Palembang

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penulisan Skripsi mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang, maka dengan ini kami mohon kepada bapak/ibu kiranya dapat memberikan izin penelitian/observasi kepada mahasiswa kami sbb:

No	Nama/NIM	Jurusan/ Prodi	Tempat Penelitian
1	Robbi Wahyudi/ 1710404010	S1 Politik Islam	Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah (Observasi tentang Data Mahasiswa)

Untuk melakukan pengambilan data penelitian
Lama pengambilan data : 1 Juni -1 juli 2021

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon bapak/ibu tidak berkeberatan untuk memberikan bantuan kepada mahasiswa kami, sehingga memperoleh bahan-bahan yang dibutuhkan beserta penjelasan lainnya dari instansi yang berada dalam binaan bapak/ibu, untuk kemudian digunakan dalam penyusunan tugas dimaksud.

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak akan diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga.

Atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Palembang, 1 Juni 2021


Dr. Endang Rochmiatun, M.Hum.
NIP. 19710727 199703 2 002

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Pikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126
Telp. (0711) 352427 website : www.adab.radenfatah.ac.id



LAMPIRAN 3



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG

FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
NOMOR : B. 308 /Un.09/IV.02/PP.01/02/2021

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI
DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UNIVERISTAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG

MENIMBANG :

- Bahwa untuk dapat menyusun skripsi yang baik, mahasiswa perlu dibimbing oleh tenaga ahli sebagai dosen pembimbing pertama dan pembimbing kedua yang bertanggung jawab untuk membimbing mahasiswa dalam rangka penyelesaian penyusunan Skripsi.
- Bahwa untuk kelancaran tugas-tugas pokok tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan:
- Lembar persetujuan judul dan penunjukan Pembimbing Skripsi oleh Kepala Prodi Ilmu Politik Islam **ROBBI WAHYUDI**, tanggal, 17 Februari 2021

MENGINGAT :

- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 53 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang.
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 407 tahun 2000;
- Instruksi Direktur Bimbaga Islam Departemen RI Nomor KEP/E/PP.00.9/147/1985 tanggal 5 Juni 1985 tentang pelaksanaan SKS dan Program S1 UIN Raden Fatah Palembang;
- Instruksi Menteri Agama RI No.B/152/1994 tentang Pelaksanaan SKS Program S1 UIN Raden Fatah Palembang;
- Pedoman Akademik UIN Raden Fatah Palembang No. LXXV tahun 2004;
- Kep.Menag RI No. 62 tahun 2015 tentang Statuta IAIN Raden Fatah Palembang;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:
Pertama : Menunjuk Saudara :

	N A M A	NIP
PEMBIMBING I	Dr. Mohammad Syawaludin, M.Ag.	19711124 200312 1 001
PEMBIMBING II	Nico Octario Adytyas, M.A.	2010109102

Dosen Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang masing-masing sebagai Pembimbing pertama dan Pembimbing kedua Skripsi Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora atas nama Saudara :

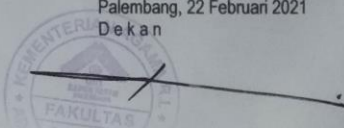
N a m a : **ROBBI WAHYUDI**
N I M : **1710404010**
Prodi : **Politik Islam**
Judul Skripsi : **"Strategi PKB Kabupaten Lahat dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Muslim Kabupaten Lahat di Pemilu Legislatif 2019 (Studi Kasus Dapil 1)**

Masa bimbingan : **Satu Tahun TMT. 22 Februari 2021 s/d 22 Februari 2022**

Kedua : Kepada pembimbing pertama dan pembimbing kedua tersebut diberi hak sepenuhnya untuk merevisi Judul/kerangka Skripsi tersebut dengan sepengetahuan Fakultas.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah/dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Palembang, 22 Februari 2021
D e k a n


Dr. Endang Rochmiatun, M.Hum.
 NIP. 19710727 199703 2 005

Tembusan :

- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Dosen Penasehat Akademik yang bersangkutan;
- Pembimbing Skripsi
- Ka. Prodi Politik Islam

Kampus A : Jlg. Prof. Dr. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126
Telp. (0711) 352427
Website : www.adab.radenfatah.ac.id

